KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA MIKRO TERHADAP PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

(Studi Di Home Industri Kerupuk Kali Di Dusun Nglongah Lor, Kabupaten Trenggalek)

SKRIPSI

oleh:

LUHMITA SAHARANI

NIM 210202110180

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA MIKRO TERHADAP PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

(Studi Di Home Industri Kerupuk Kali Di Dusun Nglongah Lor, Kabupaten Trenggalek)

SKRIPSI

oleh:

LUHMITA SAHARANI

NIM 210202110180

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

"KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA MIKRO TERHADAP PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (STUDI DI HOME INDUSTRI KERUPUK KALI DI DUSUN NGLONGAH LOR, KABUPATEN TRENGGALEK)"

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri atas dasar kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari ada laporan penelitian skripsi ini adalah hasil dari plagiasi karya orang lain, maka skripsi yang digunakan sebagai prasyarat untuk mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 22 November 2024

Penulis,



Luhmita Saharani

NIM 210202110180

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Luhmita Saharani, NIM 210202110180, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA MIKRO TERHADAP PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (STUDI DI HOME INDUSTRI KERUPUK KALI DI DUSUN NGLONGAH LOR, KABUPATEN TRENGGALEK)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 22 November 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing

Rizka Amaliah, M.Pd.
NIP. 198907092019032012

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website [redacted] E-mail [redacted]

BUKTI KONSULTASI

Nama : LUHMITA SAHARANI
NIM : 210202110180
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Rizka Amaliah, M.Pd.
Judul Skripsi : **KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA MIKRO TERHADAP PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (Studi Di Home Industri Kerupuk Kali Di Dusun Nglongah Lor, Kabupaten Trenggalek)**

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	10 September 2024	Konsultasi Judul dan menemukan gap/masalah hukum	
2.	13 September 2024	Bab 1	
3.	17 September 2024	Revisi Bab 1-3	
4.	20 September 2024	Pedoman wawancara & Bab 1-3	
5.	27 September 2024	Bab 3	
6.	4 Oktober 2024	Revisi Bab 1 & 3	
7.	8 Oktober 2024	Revisi, review dan acc proposal	
8.	13 November 2024	Pemetaan hasil wawancara dengan teori	
9.	15 November 2024	Analisis hasil penelitian	
10.	19 November 2024	Revisi abstrak, bab 1-5	
11.	21 November 2024	Revisi	
12.	22 November 2024	Acc skripsi	

Malang, 22 November 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Luhmita Saharani NIM 210202110180, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA MIKRO TERHADAP PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (STUDI DI HOME INDUSTRI KERUPUK KALI DI DUSUN NGLONGAH LOR, KABUPATEN TRENGGALEK)

Telah dinyatakan lulus dalam ujian sidang skripsi.

dengan penguji :

1. Ahmad Farroh Hasan, M.SI. ( ) Ketua Penguji
   NIP. 198605292016080110 19

2. Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H. ( ) Penguji Utama
   NIP. 197212122006041004

3. Rizka Amalijah, M.Pd. ( ) Sekretaris
   NIP. 198907092019032012

Malang, 19 Desember 2024
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

iv

MOTTO

عن جابر قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : املؤمن أيلف ويؤلف ، وال خري فيمن

ال أيلف ، وال يؤلف، وخري الناس أنفعهم للناس

Dari Jabir, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda: Orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia”.

(HR. Thabrani dan Daruquthni)

"الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا

فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا"

“Penjual dan pembeli memiliki hak untuk memilih selama mereka belum berpisah, dan jika mereka jujur dan jelas, maka mereka diberkahi dalam Transaksi mereka.Tetapi jika mereka berdusta dan bersembunyi, maka berkah transaksi itu hilang”

(HR. Bukhari dan Muslim)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukurillah, penulis sampaikan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul **"KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA MIKRO TERHADAP PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (Studi Di Home Industri Kerupuk Kali Di Dusun Nglongah Lor, Kabupaten Trenggalek)"** dapat diselesaikan dengan baik.

Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia menuju jalan kebenaran, keberhasilan skripsi ini, tidak lepas dari bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa pikiran motivasi, tenaga maupun do'a karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof.Dr. H.M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Ibu Kurniasih Bahagiati, M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan

kepada beliau yang telah memberikan waktu, bimbingan, saran, motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Ibu Rizka Amaliah, M.Pd. Terimakasih atas ilmu yang sangat bermanfaat serta penulis ucapkan terimakasih atas waktu yang telah diberikan untuk konsultasi, bimbingan, diskusi, arahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini,
6. Segenap Dosen Penguji Ujian Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang menguji, membimbing, mengarahkan dan memberikan ilmu yang berkah serta bermanfaat untuk bekal penulis di masa depan;
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua.
8. Kepada para narasumber penelitian yang berkenan untuk memberikan informasi kepada penulis yaitu pelaku usaha UMKM Kerupuk Kali di Dusun Nglongah Lor, Desa Sumberingin, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek yang sudah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi;
9. Ayah dan Ibuku yang tercinta, terkasih, dan tersayang Imam Syaroni dan Sri Alimi. Terimakasih atas segala dukungan serta do'a yang tidak pernah terputus. Terimakasih atas segala doa yang telah dipanjatkan untuk mengiringi setiap langkah dalam menyelesaikan pendidikan ini.

Terimakasih atas segala pengorbanannya baik tenaga maupun materi. Segala kesuksesan yang penulis raih adalah berkat doa Ayah dan Ibu;

10. Kakak-kakak tercinta ku, Devy Widyatama Putri, Herninda Febrianti Putri, Deni Yuli Susanto, Emy Hardiningtyas. Saya ucapkan terimakasih telah mendukung dan menyemangati penulis untuk selalu semangat mengerjakan skripsi ini hingga tepat pada waktunya, yang selalu peduli, sering megingatkan, dan memberi motivasi saat penulis mulai kehilangan semangat dalam mengerjakan skripsi;
11. Teman seperjuangan kuliah (Agata, Diva, Nina, Gusti, Firda, Ecy, dan lainnnya), temanku Devantiya, dan juga sahabatku Sahabat terkasih dan tercinta Irma Desisca. Terimakasih telah memberi dukungan, kekuatan, bantuan, motivasi serta menerima keluh kesah penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, doa terbaikku selalu membersamai kalian;
12. Aidha Dwi Saharani, Shanum, dan Kesha, adik tercinta. Terimakasih atas kepedulian dan bantuannya dalam meningkatkan *mood* dan semangat ketika lelah mengerjakan skripsi ini. Semoga ridho Allah SWT selalu mengiringi kalian berdua;
13. Untuk temanku yang tidak bisa saya sebut namanya, saya ucapkan terimakasih telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih telah membantu banyak hal yang berhubungan dengan skripsi saya hingga akhirnya bisa terselesaikan dengan tuntas. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam segala hal yang kamu lalui;

14. Untuk semua keluargaku. Terimakasih atas dukungan dan doa yang diberikan untuk Luhmita selama menempuh studi atau kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
15. Untuk diri saya sendiri, Luhmita Saharani yang telah bertahan sampai saat ini. Ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Tetaplah menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba;
16. Semua pihak yang tidak bisa penulis sampaikan satu-persatu, penulis ucapkan terimakasih atas dukunggan, bantuan dan doa yang telah diberikan hingga terselesainya skripsi ini. Semoga apa yang diberikan dibalas dengan kebaikan yang lebih.

Harapannya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan khususnya pembaca pada umumnya

Malang, 22 November 2024

Penulis,

Luhmita Saharani

NIM. 210202110180

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan perpindahan tulisan dari tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia. yang dimaksud dengan transliterasi bukanlah terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Dalam ketenentuan transliterasi di dasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari tahun 1998 No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987. Dalam banyaknya pilihan dan ketentuan yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, penelitian dll.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṡa	Ṡ	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḣa	Ḣ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ż	Ż	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamzah	.....’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tandaapa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal, Panjang

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ó′	Fathah	A	A
ó,	Kasrah	I	I
ó°	Dhammah	U	U

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya نِيْل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus pada bacaan ya’ nisbat tidak boleh digantikan dengan “i”, akan tetapi tetap ditulis dengan “iy”, hal tersebut agar tetap dapat menggambarkan ya’ nisbat pada akhirnya. Begitu juga dengan wau, setelah

fathah ditulis “aw”, seperti contoh berikut ini, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
خيير	Fathah dan ya	Ay	Khayrun
قول	Fathah dan Wau	Aw	Qawlun

D. Ta’ Marbuthah (ة)

Transliterasi Ta’ Marbûthah (ة) ada dua, yaitu: Ta’ Marbûthah (ة) hidup dikarenakan mendapatkan *fathah, kasrah,* dan *dhammah,* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan Ta’ Marbûthah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhiran Ta’ Marbûthah (ة) diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka Ta’ Marbûthah (ة) itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh: للمدرسةالرسالة menjadi *arrisalah lilmudarrisah.* atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya. Contoh: فيرحمةالله menjadi *fii rahmatillah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـّـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh: *ar rajul*

F. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam ma'arifah (ال) Akan tetapi dalam pedoman transliterasi, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah ataupun huruf qamariah. Dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Seperti contoh berikut:

1. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya mengatakan..
2. Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun
3. Billâh 'azza wa jalla

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') akan tetapi ini hanya berlaku untuk hamzah yang berada di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah berada di awal tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab merupakan alif.

Contoh: mas ulun

H. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

"…..Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais,

mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan,namun…."

Perhatikan penulisan nama "Abdurrahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "Abd al-Rahman Wahid", "Amin Rais", dan bukan ditulis dengan "Shalat."

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**

BUKTI KONSULTASI ..... **iii**

KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iv**

HALAMAN MOTTO ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xvi**

DAFTAR TABEL ..... **xviii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xix**

ABSTRAK ..... **xx**

ABSTRACT ..... **xxi**

ملخص البحث ..... **xxii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 8

E. Definisi Operasional 9

F. Sistematika Penulisan 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **12**

A. Penelitian Terdahulu 12

B. Kerangka Teori 17

1. Teori Kesadaran Hukum 17

2. Teori Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 28
3. Teori Perlindungan Hukum 39
BAB III METODE PENELITIAN 44
A. Jenis Penelitian 44
B. Pendekatan Penelitian 44
C. Lokasi Penelitian 45
D. Jenis Dan Sumber Data 45
E. Metode Pengumpulan Data 46
F. Metode Pengelolaan Data 47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 49
A. Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industri Kerupuk Kali Di Dusun Nglongah Lor, Kabupaten Trenggalek Terhadap Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko 49
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketidaksadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industri Kerupuk Kali di Dusun Nglongah Lor, Kabupaten Trenggalek Terhadap Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 59
BAB V PENUTUP 66
A. Kesimpulan 66
B. Saran 68
DAFTAR PUSTAKA 69
LAMPIRAN 74

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu 15

Tabel 2 Indikator Ketidaksadaran Hukum 59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat izin penelitian kepada Ketua RT dusun setempat 74

Lampiran 2 Surat Balasan Dari Ketua RT dusun setempat..... 75

Lampiran 3 Wawancara pelaku UMKM dan Konsumen Kerupuk Kali 76

Lampiran 4 Dokumentasi wawancara 78

ABSTRAK

Luhmita Saharani, 210202110180, **Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Terhadap Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Studi di Home Industri Kerupuk Kali di Dusun Nglongah Lor, Kabupaten Trenggalek)**, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing : Rizka Amaliah, M.Pd.

Kata Kunci : Kesadaran hukum; pelaku usaha mikro; perizinan berusaha berbasis risiko

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memiliki kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan negara. Pelaku usaha banyak menyumbang PDB negara sebesar 60,51% dan hampir 97% menyerap tenaga kerja di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mewajibkan pelaku usaha untuk mendaftarkan izin usahanya agar dengan mudah dalam pengawasan dan pemberdayaan pelaku usaha. Namun, faktanya masih banyak pelaku usaha yang belum mendaftarkan usahanya.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, berfokus pada kesadaran hukum pelaku usaha mikro Kerupuk Kali di Dusun Nglongah Lor, Desa Sumberingin, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pelaku usaha dan konsumen Kerupuk Kali, sementara data sekunder berasal dari perundang-undangan dan literatur hukum.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa semua pelaku usaha Kerupuk Kali belum menunjukkan kesadaran hukum terhadap penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, undang-undang perlindungan konsumen, dan sertifikat halal. Hal ini disebabkan karena tidak ada sosialisasi dari pihak berwenang dan pola pikir masyarakat yang masih rendah.

ABSTRACT

Luhmita Saharani, 2110202110180, **Legal Awareness of Micro Business Actors Towards the Implementation of Risk-Based Business Licensing (Study at the Kali Cracker Home Industry in Nglongar Lor Hamlet, Trenggalek Regency),** Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Rizka Amaliah, M.Pd.

Keywords : legal awareness, micro business actors, risk-based business licensing

MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises) have a large contribution to the country's growth. Business actors contribute a lot to the country's GDP, amounting to 60.51% and absorb almost 97% of the workforce in Indonesia. Therefore, the government requires actors to register their business permits so that they can easily monitor and empower business actors. However, the fact is that there are still many business actors who have not registered their businesses. This is due to various factors and reasons that are different for each business actor.

This research uses empirical juridical methods with a sociological juridical approach, focusing on legal awareness of Kali Cracker micro business actors in Nglongah Lor Hamlet, Sumberingin Village, Karangan District, Trenggalek Regency. Primary data was obtained from interviews with related business actors and consumers of Kali Crackers, while secondary data came from legislation and legal literature.

Based on the research results, it is known that all Kerupuk Kali business actors have not shown legal awareness of the implementation of risk-based business licensing, consumer protection laws, and halal certificates. This is due to the absence of socialization from the authorities and the low mindset of the community.

ملخص البحث

لوهميتا سهاراني ٢١٠٢٠٢١١٠١٨٠ **الوعي القانوني للجهات الفاعلة في الأعمال التجارية الصغيرة نحو تنفيذ ترخيص الأعمال التجارية القائمة على المخاطر (دراسة في كالي كراكر هوم الصناعة المنزلية في نغلونجاه لور هاملت، محافظة ترينجاليك)**، أطروحة برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي ,.(المعاملات)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج

المشرف: ريزكا أماليا ماجستير في التربي

الكلمات الرئيسية: الوعي القانوني؛ الأعمال التجارية الصغيرة؛ ترخيص الأعمال التجارية القائمة على المخاطر

تساهم المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مساهمة كبيرة في نمو البلد. تساهم الجهات الفاعلة في مجال الأعمال التجارية كثيرًا في الناتج المحلي الإجمالي للبلد بنسبة ٦٠,٥١% وتستوعب ٩٧% تقريبًا من العمالة في إندونيسيا. ولذلك، تشترط الحكومة على الجهات الفاعلة في مجال الأعمال تسجيل تراخيصها التجارية من أجل الإشراف على الجهات الفاعلة في مجال الأعمال وتمكينها بسهولة. ومع ذلك، فإن الحقيقة .هي أنه لا يزال هناك العديد من الجهات الفاعلة في مجال الأعمال التجارية التي لم تسجل أعمالها

يستخدم هذا البحث منهجاً قانونياً تجريبياً مع نهج قانوني اجتماعي، مع التركيز على الوعي القانوني للجهات الفاعلة في الأعمال التجارية الصغيرة في كيروبوك كالي في قرية نغلونجاه لور، قرية سومبرينجين، مقاطعة كارانجان الفرعية، محافظة ترينجاليك. تم الحصول على البيانات الأولية من مقابلات مع الجهات الفاعلة في الأعمال التجارية والمستهلكين في كيروبوك كالي، في حين تم الحصول على البيانات الثانوية من التشريعات .والأدبيات القانونية

استناداً إلى نتائج البحث، من المعروف أن جميع الجهات الفاعلة في كيروبوك كالي لم تظهر وعياً قانونياً بتنفيذ الترخيص التجاري القائم على المخاطر، وقوانين حماية المستهلك، وشهادات الحلال. ويرجع ذلك إلى .غياب التنشئة الاجتماعية من السلطات وتدني عقلية المجتمع

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) merupakan sebuah usaha yang didirikan atau dijalankan oleh seorang individu atau badan usaha. UMKM memiliki peran yang penting dalam perekonomian nasional sehingga pemerintah wajib memperhatikan dengan baik pelaku usaha UMKM yang ada di Indonesia. Menurut data dari *website* Kadin Indonesia (*Indonesian Chamber of Commerce and Industry*), sebesar 97% UMKM berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional dari keseluruhan unit usaha. Tahun 2023, pelaku usaha mencapai kurang lebih sekitar 66 juta yang mampu menyerap tenaga kerja sekitar 117 pekerja dari total keseluruhan tenaga kerja. UMKM berkontribusi sebesar Rp. 9.580 triliun atau sekitar 60,51% menyumbang Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia[1]. Ini menjadi bukti bahwa pelaku UMKM sangat berperan penting untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia sehingga perlu adanya perhatian dan perlindungan dari pemerintah.

Peran pemerintah dalam memberdayakan, memperhatikan, dan melindungi pelaku UMKM diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha. Perizinan berusaha merupakan sebuah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha ketika akan menjalankan sebuah kegiatan usaha. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja bahwa tujuan pembentukan perundang-undangan ini untuk menciptakan dan

[1] "UMKM Indonesia," *Kadin Indonesia*, 2023, https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/.

meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan, memudahkan, dan melindungi serta memberi pemberdayaan kepada para pelaku usaha baik di sektor Koperasi maupun UMKM. Dalam pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 disebutkan bahwa untuk meningkatkan investasi dan kegiatan berusaha maka diterapkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko[2]. Oleh karena itu, izin usaha menjadi salah satu syarat yang wajib dipenuhi pelaku usaha.

Secara spesifik, Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menyebutkan bahwa "untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi: (a) Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha; dan/atau (b) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko." Hal inilah yang mendasari ketentuan bahwa setiap pelaku usaha atau seseorang yang akan memulai dalam kegiatan berusaha wajib memenuhi persyaratan perizinan usaha dan/atau perizinan usaha berbasis risiko[3].

Legalitas usaha menjadi salah satu unsur penting karena menjadi identitas badan usaha. Dengan adanya nama perusahaan maka usaha tersebut akan semakin dikenal oleh masyarakat dan diharapkan berdampak pada peningkatan lapangan kerja. Sektor usaha baik makro maupun mikro yang telah mendapatkan legalitas juga akan diakui dan dianggap mampu dalam menjalankan usaha[4]. Legalitas usaha menjadi indikator penting bagi pemerintah guna memudahkan pengawasan dan

[2] Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja..
[3] Pasal 4 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
[4] Ahmad Redi et al., "Perizinan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm): Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum Dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan," *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 6, no. 1 (2022): 284-285, https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v6i1.13553.2022.

pembinaan terhadap pelaku usaha. Selain itu, dengan adanya legalitas usaha atau tanda daftar perusahaan, para pelaku usaha akan dengan mudah mendapatkan dana bantuan pengembangan usaha, pendampingan dari pemerintah, terhindar dari penertiban atau mendapatkan perlindungan hukum, membangun reputasi sebuah usaha, mendapatkan kepercayaan dari konsumen, dan keuntungan lainnya bagi pelaku usaha.

Dalam dunia bisnis, legalitas atau perizinan usaha serta izin edar adalah dua aspek yang sangat krusial. Legalitas usaha merujuk pada status hukum dari suatu perusahaan atau bisnis, sedangkan izin edar merupakan persetujuan resmi dari pemerintah untuk memasarkan produk atau layanan. Memiliki legalitas usaha dan izin edar yang sah tidak hanya memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga memberikan berbagai manfaat dan keuntungan bagi pemilik bisnis. Dalam konteks pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), perizinan berusaha memiliki hubungan yang erat dengan perlindungan konsumen. Legalitas usaha yang diperoleh melalui proses perizinan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga menjamin bahwa produk atau layanan yang mereka tawarkan memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan. Adanya tanda legalitas usaha, pelaku usaha dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan, mitra bisnis, dan investor bahwa bisnis mereka dijalankan dengan integritas dan sesuai dengan standar yang berlaku yang melindungi hak-hak pemilik bisnis, konsumen, dan produk. Contoh kasus terjadi pada pelaku usaha frozen food yang hampir dikenai denda sebesar Rp. 4 miliyar dan penjara karena tidak memiliki izin PIRT atau BPOM. Hal ini menjadi salah satu bentuk perlindungan konsumen dari

pemerintah yang menjaga kualitas dari sebuah produk agar dapat dikonsumsi masyarakat dengan aman.

Berdasarkan tingkat risikonya, perizinan usaha dibagi menjadi tiga golongan risiko yaitu tingkat risiko rendah, tingkat risiko menengah, dan tingkat risiko tinggi. Penilaian tingkat risiko ini dilakukan untuk meminimalisisasi kerusakan atau bahaya yang terjadi akibat kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Contohnya kegiatan industri yang dapat mengakibatkan polusi udara akibat pengelolaan, pencemaran lingkungan akibat limbah yang muncul, keselamatan pekerja, masalah finansial, keamanan selama proses produksi, dan kerugian lain yang kemungkinan muncul akibat kegiatan usaha.

Risiko-risiko yang muncul akibat adanya kegiatan usaha ini, menjadi alasan pemerintah mewajibkan setiap pelaku UMKM untuk mendaftarkan izin usaha. Walaupun tergolong dalam kategori UMKM yang memiliki tingkat risiko rendah, pemerintah tetap mewajibkan untuk mendaftarkan izin usaha dengan ketentuan minimal mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha). Pelaku usaha yang melanggar atau tidak mendaftarkan izin usahanya akan dikenai sanksi sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 pasal 405 ayat 1) yang berbunyi “Setiap pelaku usaha di sektor perindustiran yang tidak memiliki Perizinan Berusaha Industri dikenai sanksi administrasi berupa: (a) peringatan tertulis; (b) denda administratif; dan/atau (c) penutupan sementara”. Aturan ini menjelaskan apabila seorang pelaku usaha tidak mendaftarkan kegiatan usahanya, maka dengan tegas pemerintah akan memberikan sanksi paling berat dengan menutup secara paksa kegiatan usaha tersebut.

Sebagai wujud implementasi peraturan tentang legalitas usaha, pemerintah telah melakukan penertiban terhadap banyak usaha yang belum memiliki izin. Sanksi paling berat yang diberikan pemerintah adalah dengan penutupan sementara pada perusahaan dan dibuka kembali apabila telah mengurus izin usaha.[5] Tak hanya usaha industri skala besar, UMKM yang tergolong kecil dan tidak memiliki izin usaha juga turut ditertibkan. Beberapa koperasi yang tergolong UMKM memang pernah ditertibkan[6], tetapi ada pula UMKM yang telah beroperasi selama puluhan tahun, tetapi tidak ditertibkan. Salah satunya, UMKM kerupuk di Kabupaten Trenggalek.

Kabupaten Trenggalek tercatat ada 11.224 UMKM yang beroperasi aktif dari 13 kecamatan di Kabupaten Trenggalek[7]. Jumlah keseluruhan pelaku usaha di Kabupaten Trenggalek membuktikan bahwa Kabupaten Trenggalek memiliki potensi untuk berkembang melalui pelaku usaha yang dapat membuka akses lapangan pekerjaan. Meskipun termasuk wilayah kecil di Jawa Timur, masyarakat Trenggalek memiliki bidang usaha yang berpotensi untuk berkembang dan dapat bersaing dengan wilayah-wilayah lainnya. Oleh karena itu, sudah semestinya pemerintah setempat memantau dan memperhatikan para pelaku usaha atau UMKM yang tersebar di Kabupaten Trenggalek. Namun kenyataannya, masih

[5] "Belum Kantongi Izin Operasi, Pemkab Tutup Operasional Perusahaan," Pemerintah Kabupaten Probolinggo, 2022, https://probolinggokab.go.id/belum-kantongi-izin-operasi-pemkab-tutup-operasional-perusahaan/.
[6] "Tak Berizin, 95 Cabang Koperasi Simpan Pinjam KOMIDA Ditutup KemenKopUKM," Smesta KemenkopUKM, 2022, https://smesta.kemenkopukm.go.id/news/tak-berizin-95-cabang-koperasi-simpan-pinjam-komida-ditutup-kemenkopukm.
[7] "UMKM Di Kabupaten Trenggalek 'Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Dan Perdagangan,'" Sistem Informasi Satu Data Statistik Sektoral Pemerintah Kabupaten Trenggalek, 2024, https://satudata.trenggalekkab.go.id/dataset/722/2024/umkm-se-kabupaten-trenggalek.

banyak pelaku UMKM di Trenggalek yang belum mendaftarkan izin usahanya, seperti UMKM yang berada di Kecamatan Karangan.

Penyebaran pelaku usaha perorangan di Kecamatan Karangan menduduki posisi ke-8 dari 13 kecamatan dengan jumlah 690 UMKM. Salah satunya adalah UMKM yang bergerak di bidang industri pengolahan kerupuk setengah jadi yang berada di Dusun Nglongah Lor, Desa Sumberingin, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek. Dusun Nglongah Lor terdapat 6 pelaku usaha *home* industri mikro yang bergerak dibidang pengelolaan makanan setengah jadi yaitu kerupuk kali. Pengelolaan *home* industri ini beberapa masih dikelola sendiri dan beberapa sudah memiliki karyawan. UMKM kerupuk kali di dusun Nglongah Lor ini sudah dirintis sejak puluhan tahun, terhitung mulai dari tahun 1951. Artinya, *home* industri kerupuk kali ini telah berjalan selama 73 tahun. Dalam proses pengolahannya, semua masih menggunakan alat yang sederhana dan tradisional. Meskipun demikian, jumlah kerupuk kali yang dihasilkan perhari bisa mencapai 1 kwintal dan dikirim kepada para *supplier*-nya. Namun, di sisi lain masih terdapat berapa hal yang perlu diperhatikan saat proses produksi, seperti limbah pembakaran, alat produksi, dan fakta bahwa belum mendaftarkan izin usaha sampai saat ini[8]. Padahal, jika dilihat dari segi potensi, produk yang dihasilkan berpotensi untuk menghasilkan inovasi baru yang bisa menambah nilai penjualan pelaku usaha dan berkembangnya usaha tersebut.

Hasil dari olahan kerupuk setengah jadi ini bisa diolah lagi menjadi kerupuk goreng matang yang digoreng menggunakan minyak atau pasir. Kebanyakan dari

[8] Suparno, wawancara, (Trenggalek, 30 Mei 2024)

konsumen, lebih memilih untuk mengkonsumsi kerupuk yang digoreng menggunakan pasir. Walaupun menggoreng dengan pasir dianggap lebih aman daripada minyak, proses pengolahan harus tetap diperhatikan sebab kandungan-kandungan yang ada dalam pasir. Pasir yang digunakan untuk menggoreng kerupuk perlu melalui proses pengolahan terlebih dahulu agar aman digunakan dan tidak mengganggu kesehatan konsumen. Meskipun termasuk dalam kategori kegiatan usaha yang memiliki tingkat risiko rendah, perlu diperhatikan terhadap bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan kerupuk apakah aman untuk dikonsumsi atau tidak dan ketika digoreng menggunakan pasir dapat menimbulkan efek samping atau tidak khususnya bagi kesehatan.

Ini menjadi acuan dalam penelitian ini yang memfokuskan kajian pada produsen industri kerupuk kali di Dusun Nglongah Lor, Kabupaten Trenggalek untuk mengetahui alasan belum mengantongi izin usaha. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang atas urgensi dari legalitas atau perizinan usaha, maka dalam penelitian ini akan dibahas mengenai kesadaran pelaku usaha kerupuk kali di Dusun Nglongah Lor, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek untuk mengungkap faktor-faktor apa yang menyebabkan para pelaku UMKM tidak mendaftarkan izin usahanya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dalam proposal ini dirumuskan beberapa permasalahan pokok yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum pelaku usaha mikro Kerupuk Kali di Dusun Nglongah Lor, Desa Sumberingin, Kabupaten Trenggalek terhadap Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksadaran hukum pelaku usaha mikro Kerupuk Kali di Dusun Nglongah Lor, Kabupaten Trenggalek terhadap Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis rumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan kesadaran hukum pelaku usaha mikro Kerupuk Kali di Dusun Ngongah Lor, Desa Sumberingin, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek terhadap Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Untuk mengungkap faktor-faktor penyebab ketidaksadaran hukum pelaku usaha mikro Kerupuk Kali di Dusun Nglongah Lor, Desa Sumberingin, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek terhadap Penyelenggaaraan Perizinan Beruaha Berbasis Risiko.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini, diharapkan mampu untu memberikan manfaat bagi penulis dan pihak yang membaca hasil penelitian ini.

1. Secara Teoritis

   Penelitian ini diharapkan mampu memberi pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat khususnya di bidang ilmu hukum yang fokus di sektor bisnis atau usaha dengan memperhatikan peraturan hukum yang bersangkutan

dan berlaku yaitu dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peratuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang pembahasannya mengenai izin berusaha serta keuntungan yang didapatkan jika suatu kegiatan usaha telah mendapatkan legalitas usaha.

2. Secara Praktis

Secara praktis, dapat digunakan sebagai acuan atau rekomendasi praktis pelaksanaan perizinan usaha oleh para pelaku usaha atau masyarakat yang akan mendirikan dan/atau memiliki usaha, khususnya UMKM.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya multitafsir dalam pemahaman sebuah disiplin ilmu yang menyebabkan timbulnya kesenjangan pengetahuan, maka diperlukan sebuah penjabaran makna agar dapat dipamahi mengenai permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, akan dijabarkan penjelasan makna dalam definisi operasional dari penelitian ini, yaitu:

1. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah suatu sikap atau perilaku dalam diri seseorang yang wujudnya sesuai dengan norma atau nilai hukum yang ada. Perwujudan dari kepatuhan hukum ini yaitu adanya rasa takut akan sanksi terdapat aturan atau norma hukum yang berlaku, sehingga seseorang akan mematuhi aturan yang berlaku.

2. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan usaha yang didasarkan pada tingkat risiko suatu kegiatan usaha. Perizinan berusaha berbasis risiko merupakan sebuah legalitas usaha yang dikategorikan berdasarkan tingkat risiko bahaya yang memungkinkan akan timbul dan berdampak pada lingkungan sekitar atas kegiatan usaha tersebut.

3. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. UMKM merupakan kegiatan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. UMKM adalah kegiatan usaha yang dikelola oleh perorangan yang bergerak dibidang industri, pangan, kerajinan, dan lain sebagainya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang akan digunakan dalam penulisan penelitian yang berjudul "Kesadaran Hukum Pelaku UMKM terhadap Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pada Pelaku UMKM (Studi Di Home Industri Kerupuk Kali Di Dusun Nglongah Lor, Desa Sumberingin, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek)" adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan membahas mengenai pendahuluan dari penelitiaan ini yang memuat latar belakang masalah (latar belakang apa yang membuat penelitian ini di lakukan), rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan yang mana dalam bab ini akan memberikan gambaran arah tujuan penelitian dilakukan.

BAB II Tinjauan Pustaka, memuat hal-hal yang memiliki hubungan atau kaitan dengan penelitian terdahulu dan penjelasan mengenai Teori-teori yang digunakan sebagai analisis dalam penelitian Kesadaran Hukum Pelaku UMKM Terhadap Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Studi Di Home Industri Kerupuk Kali Di Dusun Nglongah Lor, Desa Sumberingin, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek).

BAB III Metode Penelitian, akan membahas tentang bagaimana penelitian ini dilakukan menggunakan metode apa dan yang termuat didalamnya meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode pengelolaan data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, mencakup jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada narasumber terkait dengan rumusan masalah dalapam penelitian ini yaitu kepatuhan hukum pelaku UMKM Home Industri Kerupuk Kali di Dusun Nglongah Lor, Desa Sumberingin, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek terhadap Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan apabila ditinjau dari segi Perlindungan Konsumen apakah para pelaku usaha telah memenuhi dan melaksanakan aturan tersebut.

BAB V Penutup, mencakup kesimpulan atau ringkasan dari jawaban yang diajukan dalam rumusan masalah pada penelitian ini. Selain kesimpulan, bab ini memuat saran yang bertujuan untuk memberikan masukan kepada peneliti yang akan datang supaya dapat meningatkan kualitas penelitian kedepannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan penulis bukan suatu penelitian yang baru karena telah terdapat beberapa penelitian-penelitian terdahulu. Namun, dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki konsentrasi pembahasan yang berbeda. Berikut konsentrasi pembahasan pada penelitian terdahulu.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ida Farida, Muhammad Lutfhi Radian (2024) dalam jurnal artikel ilmiahnya yang berjudul "Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku UMKM di Desa Cibatu kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi" menyatakan bahwa penerapan perizinan berbasis risiko pada pelaku UMKM di Desa Cibatu masih harus berperan serta dan ikut andil dalam pembangunan nasional dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Peran pemerintah dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM sangat penting dan diperlukan karena dapat membantu pelaku usaha untuk bisa bersaing di pasar. Selain itu masih banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui mengenai perizinan usha berbasis risiko. Hal ini disebabkan karena kurang merata informasi yang didapatkan masyarakat dan faktor rendahnya pendidikan pelaku usaha.[9]
2. Penelitian yang dilakukan oleh Safira Diah Prasiwi, Lailul Marsyidah, Slamet Hari Sutanto (2024) dalam jurnal artikel ilmiahnya yang berjudul

[9] Ida Farida and Muhammad Luthfi Radian, "Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku UMKM Di Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi," *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024).

"Implementasi Kebijakan Perizinan Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 (Studi Usaha Mikro dan Kecil Topi di Desa Punggul, Kabupaten Sidoarjo)" menyatakan bahwa pengimpelementasian kebijakan perizinan usaha di UMK Desa Panggul masih belum berjalan dengan baik karena terkendala dari pelaksanaannya. Banyak pelaku usaha yang belum memiliki legalitas usaha sehingga kurang berkembang dengan baik. Namun, para aparatur pemerintahan telah melakukan seperti sosialisasi dan jemput bola dalam mengurus NIB telah dilaksanakan dan cukup membawa dampak baik serta efektif. Adapun hal lain dilakukan dengan mengadakan koordinasi internal antara pelaksana/para aparatur agar tetap terjalin kekompakannya dan tidak terjadi kesenjangan.[10]

3. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Bimaresmana, Opan Satria Mandala, Nakzim Khalid Siddiq, Maulana Syekh Yusuf (2023), dalam jurnal artikel ilmiah yang berjudul "Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Berbasis Risiko (Studi Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Mataram) Implementation of Risk-Based Business Permits (Study of Micro, Small and Medium Enterprises in Mataram City)" menyatakan bahwa perizinan usaha saat ini menjadi mudah dilakukan karena telah ada sistem elektornik pelayanan perizinan secara online melalui sistem OSS (Online Single Submission). Perizinan usaha sangat penting bagi pelaku

[10] Safira Diah Prasiwi, Lailul Mursyidah, and Slamet Hari Sutanto, "Implementasi Kebijakan Perizinan Usaha Mikro Dan Kecil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 (Studi Usaha Mikro Dan Kecil Topi Di Desa Punggul, Kabupaten Sidoarjo)," *Cakrawala* 18, no. 1 (2024): 59–73, https://doi.org/10.32781/cakrawala.v18i1.629.

UMKM karena akan mendapatkan kemudahan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Namun pada kenyataannya masih banyak pelaku UMKIM di Kota Mataram yang belum mendaftarkan usahanya karena ketidaktahuan pelaku usaha terhadap kepentingan izin usaha.[11]

4. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alifia Faizatul A'la (2024), dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 (Studi Di CV Baruna Putra Pandaya) " menyatakan bahwa salah satu pelaku usaha di CV Baruna Putra Pandaya belum memgirimkan laporan terkait kegiatan usahanya, sehingga pihak CV kesulitan dalam melaporkan progres usahanya di sistem OSS. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kepatuhan hukum pelaku usaha agar pelaporan kegiatan usaha pada sistem OSS dapat tepat waktu .[12]
5. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hesty Rinda Arini(2023) dalam skripsinya yang berjudul "Efektivitas Pendaftaran Izin Usaha Umkm Melalui Sistem Online Single Submission Risk Based Approach Perspektif Teori Sistem Hukum Dan Maslahah Mursalah" menyatakan bahwa perizinan melalui sistem OSS RBA kurang efektif karena ketidaktahuan pelaku usaha mengenai sistem OSS. Akan tetapi dari pihak pemerinta atau

[11] Muhammad Bimaresmana et al., "Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Berbasis Risiko (Studi Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Mataram) Implementation of Risk-Based Business Permits (Study of Micro , Small and Medium Enterprises in Mataram City) Universitas Bumigora , Indonesia Perizina," *Jurnal Findametal Justice* 4, no. 2 (2023).
[12] Alifia Faizatul A'la, "TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 (Studi Di CV Baruna Putra Pandaya)," *Etheses Uin Malang* (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2024), http://etheses.uin-malang.ac.id/59315/1/200202110066.pdf.

dinas penanaman modal telah memberi fasilitas berupa pojok OSS dan fasilitas ini tidak banyak diketahui oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran hukum terkait perizinan usaha .[13]

Tabel 1
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ida Farida, Muhammad Lutfhi Radian (2024) dalam jurnal artikel ilmiahnya yang berjudul "Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku UMKM di Desa Cibatu kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi"	Sama-sama membahas tentang bagaimana pengimplementasian Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Penelitian terdahulu membahas pengimpelentasian di DPMPTSP, sedangkan penelitian ini fokus pada kesadaran hukum pelaku usaha UMKM kerupuk kali terhadap pendaftaran izin usaha berbasis risiko di Dusun Nglongah Lor Trenggalek.
2.	Safira Diah Prasiwi, Lailul Marsyidah, Slamet Hari Sutanto (2024) dalam jurnal artikel ilmiahnya yang berjudul "Implementasi Kebijakan Perizinan Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 (Studi Usaha Mikro dan Kecil Topi di Desa	Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang implementasi kebijakan perizinan berusaha sebagaimana dalam PP Nomor 5 tahun 2021	Penelitian terdahulu meneliti tentang pelaksanaan kebijakan perizinan UMK di Desa Punggul, sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus pada kesadaran pelaku UMKM terhadap PP Nomor 5 tahun 2021 dan akan ditinjau dari segi hukum perlindungan konsumen.

[13] Hesty Rinda Arini, "EFEKTIVITAS PENDAFTARAN IZIN USAHA UMKM MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM DAN MASLAHAH MURSALAH," *Etheses Uin Malang* (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023), http://etheses.uin-malang.ac.id/59315/1/200202110066.pdf.

	Punggul, Kabupaten Sidoarjo)"		
3.	Muhammad Bimaresmana, Opan Satria Mandala, Nakzim Khalid Siddiq, Maulana Syekh Yusuf (2023), dalam jurnal artikel ilmiah yang berjudul "Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Berbasis Risiko (Studi Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Mataram) Implementation of Risk-Based Business Permits (Study of Micro, Small and Medium Enterprises in Mataram City)"	Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan perizinan usaha berbasis risiko berdasarkan PP Nomor 5 tahun 2021	Penelitian terdahulu membahas tentang implementasi pelaksanaan OSS RBA sebagai sistem yang memudahkan pelaku usaha dalam pendaftaran izin usaha sedangkan penelitian ini akan membahas bagaimana kesadaran pelaku usaha kerupuk kali terhadap pe nyelenggaraan perizinan usaha berbasis risiko.
4.	Alifia Faizatul A'la (2024), dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 (Studi Di CV Baruna Putra Pandaya)	Sama-sama membahas tentang pelaksanaan perizinan usaha berbasis risiko oleh pelaku usaha	Penelitian terdahulu membahas pelaksanaan perizinan usaha berbasis risiko di CV Baruna Putra Pandaya, sedangkan penelitian ini membahas kesadaran hukum pelaku usaha dan ditinjau dari hukum perlindungan konsumen pada pelaku UMKM Kerupuk kali
5.	Hesty Rinda Arini(2023) dalam skripsinya yang berjudul "Efektivitas Pendaftaran Izin Usaha Umkm Melalui Sistem Online Single Submission Risk Based Approach Perspektif Teori Sistem Hukum Dan Maslahah Mursalah"	Persamaannya sama-sama membahas tentang penyelengggaraan perizinan usaha berbasis risiko	Penelitian terdahulu lebih fokus pada keefektifannya, sedangkan penelitian ini fokus pada kesadaran hukum pelaku usaha terhadap perizinan usaha berbasis risiko dan perspektif perlindungan konsumen

B. Kerangka Teori

1. Teori Kesadaran Hukum

a. Kesadaran Hukum

Menurut Ewick dan Silbey, kesadaran hukum adalah sesuatu yang mengacu pada cara seseorang dalam memahami hukum dan institusi hukum yaitu pemahaman yang memberi pengalaman dan tindakan kepada seseorang[14]. Pengertian kesadaran hukum menurut para ahli adalah[15]:

1) Seorjono Soekanto menjelaskan bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran yang terdapat dalam diri seseroang mengenai tentang hukum baik hukum yang ada maupun yang diharapkan ada.
2) Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa kesadaran hukum memiliki arti kesadaran tentang apa yang dilakukan oleh manusia atau perbuatan seseorang kepada orang lain. Artinya kesadaran menjadi kewajiban masing-masing.
3) Paul Scholten mengartikan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran yang melekat pada diri manusia mengenai hukum dan hal yang seharusnya wajib dibedakan mana antara hukum dan tidak hukum atau mana yang seyogyanya atau tidak seyogyanya.

Pengertian yang dikemukakan oleh para ahli tersebut menggambarkan dan menjelaskan bahwa kedsadaran hukum adalah tindakan manusia yang mengetahui

[14] Zulkarnain Hasibuan, "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini," *Publik* 2, no. 2 (2014): 78–92, http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/40.
[15] Sholikah Naimatus, "Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima Di Ngunut Terhadap Peraturan Daerah No 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum"," *Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung*, 2019, 8–46.

atau mengerti tentang hukum atau tidak, bisa membedakan dan melaksaakan mana yang seharusnya ditaati dan tidak ditaati. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tentu akan melaksanakan hal yang sudah diatur oleh hukum. Walaupun aturan telah ditetapkan, apabila seseorang tidak memiliki kesadaran hukum penuh, maka seseorang tidak akan menaati aturan atau hukum yang telah diatur dan tetapkan.

b. Indikator Kesadaran Hukum

Menurut Prof. Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu:[16]

1) Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang hal yang dilarang dan hal yang diperbolehkan. Misalnya dalam konteks perlindungan konsumen, para pelaku usaha dilarang untuk memberkan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi barang dan/atau jasa.
2) Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut. Pemahaman hukum dapat diperoleh ketika masyarakat mampu dengan mudah untuk memahami dan mengerti suatu peraturan yang berlaku.

[16] Prof. Dr. Muslan Abdurrahman, *Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum*, ed. AH. Riyantono, 1st ed. (Malang: UMM Press, 2009).

3) Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
4) Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhinya.

Keempat indikator kesadaran hukum ini, menjadi penilaian perilaku patuh atau ketaatan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, tahapan-tahapan yang lebih pokok dari kesadaran hukum adalah pengetahuan tentang isi peraturan yang disatu pihak dipengaruhi oleh usia, tingkat studi dan jangka waktu tinggal dilain pihak mempengaruhi sikap hukum dan perilakuan hukum, pengetahuan tentang isi peraturan terjadi karena proses internalisasi dan proses imitasi terhadap pola-pola perikelakuan pejabat- pejabat hukum yang kedua-duanya memakan waktu yang relatif lama.

c. Faktor-faktor kesadaran hukum

Sikap hukum masyarakat dapat diketahui dari seberapa jauh masyarakat mengetahui dan memahami substansi dari hukum tersebut. Pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap suatu hukum akan berpengaruh terhadap penilaian seberapa jauh hukum tersebut berlaku di masyarakat. Namun, dengan adanya pemahaman dan pengetahuan tentang hukum, tidak dapat dijadikan tolak ukur kesadaran masyarakat terhadap suatu peraturan. Kesadaran hukum harus berasal dari diri sendiri karena kesadaran tidak dapat dipaksakan oleh siapapun. Oleh

karena itu, jika seseorang memiliki kesadaran hukum yang rendah dapat disebabkan karena beberap hal seperti ketidaktahuan hukum, ketidakpedulian terhadap hukum, dan hal lainnya. Namun, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran serta kepatuhan hukum seseorang yaitu[17]:

1) Faktor hukum. Hukum memiliki fungsi untuk memberikan kepastian dan keadilan. Masyarakat mempunyai aturan yang mengatur kehidupannya dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis.
2) Faktor penegak hukum. Keadilan dan kepastian hukum harus diketahui dan dipahami oleh semua penegak hukum. Hukum akan dapat ditegakkan dengan maksimal apabila penegak hukum dapat menjalankan semua peraturan dengan maksimal. Perilaku penegak hukum yang kurang simpatik dan penanganannya yang kurang akan berpengaruh pada perilaku masyarakat terhadap hukum.
3) Faktor masyarakat. Faktor yang dinilai berdasarkan penerapan atau berlaku tidaknya suatu hukum di lingkungan tersebut.
4) Faktor internal. Faktor internal dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti pendidikan, pola pikir, dan lain sebagainya. Umumnya masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah akan sulit mengetahui tentang regulasi hukum. Mereka cenderung tidak mengerti dan tidak paham terhadap kepentingan hukum sehingga respon masyarakat menjadi kurang.

[17] Syamsarina Syamsarina et al., "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat," *Jurnal Selat* 10, no. 1 (2022): 81–90, https://doi.org/10.31629/selat.v10i1.5216.

5) Motivasi diri. Motivasi dapat menjadi faktor dalam meningkatkan kesadaran hukum yaitu dengan meningkatkan rasa hormat terhadap hukum. Motivasi berasal dari kata Latin *movore*, yang berarti gerak atau dorongan untuk bergerak.[18] Sementara itu, dalam Bahasa Indonesia, motivasi berasal dari kata *motif*, yang mengacu pada daya atau usaha yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Motif ini berfungsi sebagai pendorong internal yang mendorong individu untuk melakukan aktivitas tertentu demi mencapai tujuannya. Oleh karena itu, motivasi dapat dipahami sebagai daya penggerak yang telah aktif mendorong seseorang untuk bertindak.[19]

Motivasi adalah kekuatan yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan suatu hal. Umumnya, motivasi dapat diterapkan dalam bentuk perbuatan. Dalam tingkatannya motivasi dapat dinilai dengan seberapa kuat intenstas perilaku seseorang. Seseorang yang memiliki intensitas perilaku yang kuat berarti memiliki motivasi yang tinggi, sedangkan seseorang yang memiliki intensitas perilaku yang rendah maka tingkat motivasinya rendah. Adanya tingkatan ini menjadi acuan untuk menunjukkan arah perilaku seseorang[20] dan pada proses motivasional dapat mendasari rentang sikap, daya

[18] Purwa Atmaja Prawira, Psikologi Pendidikan dalam Perspektif Baru, (Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 319.
[19] Sardiman A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, hlm. 73.
[20] Anisyah Rahmadania and Hery Noer Aly, "Implementasi Teori Hirarchy Of Needs Maslow Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Di Yayasan Cahaya Generasi Islam Kota Bengkulu," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 4 (2023): 261–72, https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i4.17456.

tahan, jumlah atau tingkatan sikap yang akan diperngaruhi, dan bagaimana sikap itu diterjemahkan kedalam suatu tindakan.[21]

Motivasi menyebabkan suatu dorongan dalam melakukan serta mempengaruhi sebuah kelakuan, fungsi motivasi meliputi sebagai berikut:[22]

a) Mendorong timbulnya kelakuan atau seuatu perbuatan.
b) Motivasi sebagai pengarah, artinya mengarahkan suatu perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan.
c) Motivasi berfungsi sebagai penggerak, besar kecilnya sebuah motivasi akan mempengaruhi cepat lambatnya suatu pekerjaan
d) Motivasi berfungsi sebagai suatu proses mengantarkan seseorang pada pengalaman-pengalaman yang memungkinkan mendapatkan sebuah pelajaran.

Untuk menumbuhkan motivasi dalam diri seseorang maka dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut[23]:

a) Contoh tauladan

Contoh tauladan merupakan sikap, perbuatan, atau tindakan yang dilakukan sehari-hari. Contoh tauladan berwujud insyarat-isyarat non-verbal atau tingkah laku yang dapat ditiru dengan kita melihatnya. Adanya contoh teladan ini dapat menghadirkan gejala identifikasi positif

[21] Herbert C. Kelman, "Compliance_identification_and_internalization: Three of Process Attitude Change," *Journal of Conflict Resolution* 2, no. 1 (1959): 51–60, https://scholar.harvard.edu/hckelman/files/Compliance_identification_and_internalization.pdf.
[22] Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), hlm. 161.
[23] Lis Yulianti Syafrida Siregar, "Motivasi Sebagai Pengubahan Perilaku," *Forum Paedagogik* 11, no. 2 (2020): 81–97, https://doi.org/10.24952/paedagogik.v12i2.3156.

yaitu penyamaan diri dengan orang yang dilihat tersebut. Namun perlu diingat bahwa belum tentu contoh tauladan dapat menumbuhkan motivasi dalam diri.

b) Perintah dan Anjuran

Perintah merupakan suatu keharusan dalam melakukan dan memenuhi suatu hal. Perintah menjadi salah satu bentuk sikap disiplin yang positif. Sedangkan anjuran merupakan ajakan atau saran dalam berbuat dan melakukan sesuatu. Anjuran diberikan supaya memberi dorongan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu yang harus dilakukan.

c) Teguran dan Peringatan

Teguran merupakan suatu kritik yang digunakan untuk memberikan masukan kepada seseorang agar dapat mengubah dan memperbaiki pola hidup dan perilaku. Sedangkan peringatan merupakan tindakan tegas yang dilakukan ketika teguran tidak berhasil diterapkan. Jadi, diantara teguran dan peringatan memiliki tingkatan yang berbeda.

Teguran masih bersifat mengingatkan karena suatu tindakan yang dilakukan masih tergolong ringan, sedangkan peringatan bersifat tegas karena tidak adanya indikasi patun dan taat terhadap perintah atau aturan yang berlaku. Teguran biasanya diberikan apabila seseorang melakukan kesalahan sebanyak sekali atau dua kali, sedangkan peringatan diberikan apabila seseorang telah melakukan kesalahan yang sama lebih dari dua kali.

d) Larangan dan Ancaman

Larangan adalah keharusan agar tidak bertindak dan melakukan perbuatan yang dapat merugikan. Larangan akan mengarahkan seseorang kepada hal-hal yang positif, walaupun larangan dapat berdampak negatif. Selain itu, larangan akan membentuk sikap patuh atau ketaatan seseorang terhadap suatu aturan. Misalnya larangan untuk memberikan keterangan palsu terhadap produk barang dan/atau jasa yang diedarkan.

Ancaman adalah bentuk tindakan yang dapat diberikan kepada seseorang untuk mengoreksi tingkah laku negatif serta dilakukan perjanjian apabila tinndakan tersebut diulang kembali maka akan dijatuhi hukuman atau sanksi. Ancaman dapat menimbulkan ketakutan dan melahirkan suatu kesadaran bahwa tindakan yang dilakukan merupakan tindakan yang salah, sehingga seseorang tidak akan mengulangi tindakan tersebut atau seseorang akan merubah sikap negatif yang ada.

e) Hukuman

Hukuman merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang diberikan kepada seseorang hingga menimbulkan suatu nestapa. Adanya nestapa akan menumbuhkan kesadaran bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang salah dan akan menimbulkan efek jera. Hukuman dapat berbentuk hukuman intelektual, hukuman perasaan seperti diejek dan dipermalukan, serta hukuman badan seperti berlakunya sanksi dalam peraturan perudnang-undangan.

Contoh jika seorang produsen memberikan keterangan palsu terhadap barang yang diedarkan, maka akan dikenai sanksi ganti rugi, denda, dan pidana penjara.

Menurut Woodworth, motivasi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:[24]

a) *Unlearned motives* (motivasi yang tidak dipelajari) atau motivasi bawaan, yaitu motivasi dasar yang sudah ada sejak lahir, seperti dorongan untuk makan, minum, berhubungan seksual, bergerak, dan istirahat. Motivasi ini sering disebut sebagai motivasi yang diatur secara biologis.
b) *Learned motives* (motivasi yang dipelajari), yaitu motivasi yang berkembang karena pengalaman atau pembelajaran, seperti dorongan untuk mempelajari ilmu pengetahuan tertentu atau mengejar posisi jabatan. Motivasi ini sering disebut sebagai motivasi yang dipengaruhi oleh faktor sosial, karena manusia hidup dalam konteks sosial.

Adapun jenis-jenis dari motivasi dibagi menjadi 2 yaitu motivasi instrinsik dan motivasi ekstrinsik.[25] Motivasi intrinsik merupakan motivasi yang lahir dari diri sendiri, sedangkan motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang lahir dari luar seseorang. Motivasi instrinsik tidak memerlukan rangsangan dari luar karena pada dasarnya motivasi ini merupakan motif yang aktif dan berfungsi secara otomatis pada diri seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan motivasi ekstrinsik memerlukan rangsangan dari luar agar

[24] Abdul Rahman Shaleh, Psikologi : Suatu Pengantar…, hlm. 193-194.
[25] Ahmad Mathar, "Sanksi Dalam Peraturan Perundang Undangan," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 46, https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/602/482.

seseorang dapat melakukan suatu perbuatan. Dalam konteks hukum, jika seseorang memiliki keinginan dan tujuan terciptanya keselarasan dan hubungan baik dengan pemerintah, maka seseorang akan mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.[26]

Dapat dikatakan bahwa salah satu munculnya motivasi karena adanya pengaruh sosial. Namun, tingkatan pengaruh ini akan membawa perbedaan kepada setiap individu. Proses yang terjadi akan berbeda meskipun terlihat sama. Terdapat tiga proses dalam menerima pengaruh yang berbeda untuk melihat sejauh mana perilaku seseorang.[27] Tiga faktor tersebut yaitu *compliance, identification,* dan *internalization*.

a) *Compliance* merupakan suatu bentuk kepatuhan hukum yang didasarkan pada berlakunya sebuah sanksi. Sanksi menjadi satu tindakaan yang diberikan kepada masyarakat apabila melanggar aturan atau norma yang berlaku. Sanksi dapat berupa teguran keras, peringatan tertulis (administrasi), sanksi pidana, dan lain sebagainya. Sanksi tidak semata-mata untuk menghukum seseorang, akan tetapi sanksi diterapkan agar seseorag dapat merubah perilaku yang buruk dan memberikan efek jera akibat pelanggaran yang dilakukan. Adanya sanksi akan memicu motivasi atau keinginan masyarakat untuk bertindak sesuatu guna menghindari sanksi yang diberlakukan.

[26] Zet Ena and Sirda H Djami, "Peranan Motivasi Intrinsik Dan Motivasi Ekstrinsik Terhadap Minat Personel Bhabinkamtibmas Polres Kupang Kota," *Among Makarti* 13, no. 2 (2021): 68–77, https://doi.org/10.52353/ama.v13i2.198.
[27] Herbert C. Kelman, "Compliance_identification_and_internalization: Three of Process Attitude Change."

b) *Identification* merupakan suatu bentuk kepatuhan hukum yang didasarkan pada hubungan antar sesama. faktor ini diterapkan atas dasar keinginan untuk menjaga hubungan antara anggota kelompok atau pihak yang memiliki wewenang. Misalnya kewajiban untuk mendaftarakan usahanya. Pemerintah dalam membuat aturan memiliki tujuan yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat. Kewajiban pelaku usaha untuk mendaftarakan usahanya bertujuan agar pemerintah dengan mudah memantau progres kegiatan usaha. Jadi, dalam *identification* ini kedua pihak akan sama-sama terhubung dan memudahkan dalam komunikasi. Selain itu dapat dilakukan dengan cara mengadakan sosialisasi terkait hal-hal tertentu yang relevan dengan keadaan di wilayah tersebut. Sosialisasi menjadi salah satu bentuk interaksi antara masyarakat dengan pihak berwenang.

c) *Internalization* merupakan suatu bentuk kepatuhan hukum yang didasarkan pada keyakinan terhadap hukum. Bentuk keyakinan ini muncul karena pengetahuan yang dimiliki tentang tujuan dan fungsi dari hukum tersebut. Seseorang akan menerima pengaruh karena isi –ide dan tindakan yang menyusunnya secara instrinsik dapat bermanfaat. Seseorang akan bertindak sesuai dengan nilai sistemnya karena dianggap berguna untuk memecahkan suatu masalah atau merasa tepat dengan kebutuhannya[28]. Misalnya kewajiban untuk mendaftarkan sertfikasi halal pada sebuah produk. Adanya sertifikasi halal akan mendatangkan kepercayaan pada konsumen

[28] Herbert C. Kelman.

bahwa produk tersebut telah diakui dan telah berstandar nasional dan dinilai aman untuk digunakan.

Sadar terhadap hukum menjadi hal yang penting karena untuk melaksanakan dan mematuhi sebuah aturan, seseorang harus mengetahui apa itu hukum dan bagaimana hukum itu berlaku kepada masyarakat serta harus mengetahui tujuan adanya aturan tersebut. Kesadaran terhadap hukum sendiri dapat terbentuk karena faktor-faktor sebagai berikut: (1) rasa takut pada sanksi**;** (2) memelihara hubungan baik dengan kelompok; (3) memelihara hubungan baik dengan penguasa; (4) kepentingan pribadi terjamin; dan (5) sesuai sengan nilai yang dianut. Faktor-faktor ini yang akan menjadi motivasi masyarakat untuk mematuhi aturan yang ada. Pembuktian faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh, maka akan lebih menghubungkan antara masing-masing indikator kesadaran hukum secara menyeluruh maupun terpisah dan ketiga indikator itulah yang akan menjadi faktor untuk mendatangkan motivasi agar masyarakat patuh dan sadar terhadap peraturan yang ada.

2. Teori Perizinan Usaha Berbasis Risiko

a. Pengertian Perizinan Usaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko menjelaskan pengertian dari perizinan usaha adalah sebuah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk mengawali atau memulai dan menjalankan kegiatan usahanya. Izin menjadi salah satu komponen atau instrumen yang penting dan paling banyak digunakan dalam pengadministrasian suatu kegiatan atau rencana. Izin

merupakan suatu perbuatan hukum administrasi yang diterapkan dalam suatu aturan atas dasar syarat dan langkah-langkah sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan. Risiko merupakan suatu hal atau peristiwa yang dapat terjadi dan berdampak pada tujuan baik dampak yang positif atau negatif.

Suatu perizinan akan menghasilkan kelegalan atau legalitas suatu usaha atau kegiatan lain yang akan memberikan kemudahan dan kebebasan dari larangan-larangan yang ditetapkan. Perizinan menjadi bentuk pengendalian suatu kegiatan masyarakat yang dimiliki oleh pemerintahan dalam hal atau tujuan untuk pengendalian dan pemantauan. Perizinan dapat berupa izin daftar, rekomendasi, sertifkasi, dan lainnya yang dilakukan sebelum memulai suatu kegiatan.

Pengertian izin dalam arti sempit adalah suatu larangan, kecuali diperbolehkan dengan adanya suatu tujuan agar ketentuan yang bersankutan dengan perkenan dapat dilakukan secara teliti diberikan batas tertentu pada tiap kasusnya. Sedangkan izin dalam artian yang luas adalah segala sesuatu yang menimbulkan akibat yang memiliki tingkat kemiripan yang sama yaitu bentuk, tertentu yang diperbolehkan untuk melaksanakan sesuatu yang dilarang.[29]

Pengertian lain yang dikemukakan oleh Lutfi Efendi adalah bahwa izin merupakan suatu bentuk persetujuan yang berasal dari penguasa atas dasar undang-undang atau peratuan pemerintah dalam kondisi yang

[29] M.H. Dr. Siti Kotijah, S.H., *Buku Ajar Hukum Perizinan Online Single Submission (OSS)*, 1st ed. (Bantul: CV. MFA, 2020).

menyimpang dari ketentuan atas larangan perundangan. Sedangkan makna izin yang diikemukakan oleh Prins bahwa izin biasanya dilakukan karena danah suatu perbuatan atau kegiatan yang dirasa memiliki unsur yang berbahaya, seperti sesuatu yang dilarang yang menjadi objek dari perbuatan tersebut dapat dikerjakan asalkan berada dibawah pengawasan.

Risiko merupakan suatu hal atau peristiwa yang dapat terjadi dan berdampak pada tujuan baik dampak yang positif atau negatif, sedangkan risiko dalam PP Nomor 5 tahun 2021 diartikan sebagai suatu potensi yang dapat menghasilkan kerugian dari bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. Jadi, perizinan usaha berbasis risiko dapat diartikan sebagai suatu kegiatan legalitas usaha yang dinilai dari risiko atau dampak yang muncul dari kegiatan usaha tersebut terhadap lingkungan sekitar.

Perizinan usaha menjadi hal yang urgent bagi pelaku usaha. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 bahwa izin usaha menjadi hal yang wajib dilaksanakan oleh pelaku usaha. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 menyebutkan dengan jelas bagi seseorang yang akan melaksanakan kegiatan usaha maka wajib memenuhi persyaratan dasar perizinan usaha atau perizinan berusaha berbasis risiko.

b. Jenis Perizinan Usaha Berbasis Risiko

Setelah disahkan Undang-Undang Cipta Kerja (Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023), pemerintah mengganti sistem perizinan usaha di Indonesia. Pelaku usaha atau UMKM sapat memulai kegiatan usahanya setelah memenuhi semua bentuk komitmen izin usah (pendekatan *ex-post*).

Pendekatan ini digunakan karena dalam proses izin usaha, saat ini mengedepankan penggunaan sistem RBA (*Risk Based Approach*) atau izin usaha atas dasar tingkatan risiko. Pendaftaran izin usaha dapat melalui platform yang bernama OSS (*Online Single Submission*).

Perizinan usaha saat ini diintegrasikan secara elektronik melalui sistem OSS-RBA. Pemerintah menetapkan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang disusun oleh BPS (Badan Pusat Statistik) guna untuk menyesuai anggaran dasar yang digunakan pelaku ushaa untuk menjalankan kegiatan usahanya. Sebagaimana tujuan dibentuk KBLI adalah untuk menyediakan kerangka klasifikasi kegiatan usaha agar terkumpul menjadi satu sesuai dengan jenisnya, dan memudahkan dalam pengolahan, penyajian, serta analisis data statistik kegiatan, serta sebagai acuan untuk mengetahui keadaan kegiatan ekonomi.

Penyelenggaraan perizinan usaha berbasis risiko didasarkan pada prinsip perizinan *ex-post* yaitu berifikasi dapat dilakukan kemudian. Artinya pemerintah percaya dan memberikan kemudahan kepada pelaku usaha atau UMKM dalam menjalankan kegiatan usahanya, namun komitmen akan perizinan usaha tetap harus dipenuhi. Prinsip ini dikenal dengan prinsip *trust but verify.* Atas dasar prinsip ini perizinan usaha berbasis risiko dibagi menjadi 3 jenis. Pasal 7 ayat (7) UU Cipta Kerja dan pasal 10 ayat (1) PP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko menerangkan terkait tingatan risiko pada kegiatan usaha, meliputi: (1)

kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah; (2) kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah; dan (3) kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi.

Berdasarkan tingkat risiko yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang, maka tingkatan risiko kegiatan usaha pelaku UMKM akan ditetapkan melalui sistem OSS-RBA. Pemenuhan syarat perizinan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha menyesuaikan dengan tingkat risiko usaha yang djalankan. Semain rendah tingkat risiko, semakin mudah perizinan usahanya. Semakin tinggi tingkat risiko yang dihasilkan dari kegiatan usahanya, maka akan semakin banyak hal-hal yang perlu diurus agar kegiatan usaha dapat berjalan. Penilaian terhadap tingkat risiko setiap kegiatan usaha, dinilai melalui empat aspek:

1) Aspek kesehatan.

   Aspek kesehatan dapat dinilai melalui tingkat keamanan dari bahan produk, apakah akan menimbulkan bahaya bagi tubuh jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang.

2) Aspek keselamatan.

   Aspek keselamatan dapat dinilai melalui proses produksinya. Keselamatan dalam penggunaan produk yang dihasilkan dan diedarkan kepadan konsumen tetap menjadi perhatian khusus bagi produsen. Akan tetapi keselamatan pekerja juga wajib menjadi perhatian dalam kegiatan usaha.

3) Aspek lingkungan.

Aspek ini dinilai melalui seberapa besar pengaruh limbah yang dihasilkan dari pengolahan produk yang dihasilan. Hal ini sangat perlu diperhatikan karena limbah yang dihasilkan dari suatu pengolahan biasanya mengandung unsur-usnur yang dapat merusak lingkungan. Misalnya limbah pabrik pengolahan atau penggorengan kerupuk yang menhasilkan asap. Asap yang dihasilkan ini dapat menjadi polusi udara yang nantinya akan berdampak pada masyarakat sekitar.

4) Aspek pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.

Aspek ini dinilai berdasarkan seberapa besar pemanfaatan atau penggunaan sumber daya alam untuk kegiatan usaha. Penggunaan sumber daya alam tanpa melalui perencanaan dapat mengeksploitasi sumber daya alam yang berlebihan sehingga dapat menimbulkan kerusakan dan kerugian yang akan berdampak pada generasi selanjutnya. Akibatnya akan banyak kerusakan dan keseimbangan lingkungan baik dari segi kuantitas dan kualitasnya. Selain berdampak pada manusia, kerusakan juga akan berdampak pada ekosistem seperti flora dan fauna.

Berlaku juga pada pengelolaan sumber daya yang harus dikelola dengan optimal supaya bisa membawa kebermanfaatan dan kesejahteran bagi masyarakat. Pengelolaan sumber daya dengan tepat, dapat membawa dampak baik bagi pembangunan nasional. Namun demikian, dalam proses pengelolaan tetap harus memperhatikan

kelestarian lingkungan agar lingkungan tetap terjaga dan sumber daya tetap aman sampai pada generasi selanjutnya.[30]

Persyaratan yang harus dipenuhi mengacu pada seberapa besar risiko yang dihasilkan dengan mengacu pada empat aspek tersebut. Kegiatan usaha yang berpotensi menghasilkan kerugian kecil maka akan berbeda persyaratan yang wajib dipenuhi dengan kegiatan usaha dapat menghasilkan kerugian besar. Contohnya pelaku usaha catering dan bakery yang masuk dalam kategori UMKM atau home industri maka dapat dinilai bahwa tingkat risiko yang dihasilkan dari kegiatan ini relatif rendah atau kecil dan pendaftaran izin usaha akan semakin mudah. Contoh lain seperti perusahaan tambang. Kegiatan usaha ini akan mempengaruhi dan berdampak banyak pada lingkungan sekitar, sehingga untuk mendirikan perusahaan tambang maka harus mengurus dokumen izin yang banyak.

c. Syarat Perizinan Usaha Berbasis Risiko

Berdasarkan pengklasifikasian tingkat risiko, syarat yang diberlakukan terhadap izin kegiatan usaha tidak disamaratakan. Ada perbedaan antara kegiatan usaha yang memiliki tingkat risiko rendah, tingkat risiko menengah rendah, tingkat risiko menengah tinggi, dan tingkat risiko tinggi. Berbedaan ini bertujuan untuk memetakan segala hal yang berkaitan dengan pemenuhan perizinan usaha dengan seluruh komitmen-komitmen yang melekat pada

[30] annonim, "Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam," *Al-Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2014, 1–18, http://jurnal.sties-baktiya.ac.id/index.php/alhisab/article/view/63.

kegiatan usahanya. Penilaian tingkat risiko yang memungkinkan akan muncul akibat kegiatan usaha dinilai berdasarkan 4 aspek. Aspek tersebut meliputi[31]: (1) aspek keselamatan; (2)aspek kesehatan; (3) aspek lingkungan; dan (4) aspek pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya. Aspek – aspek ini menjadi bagian terpenting dalam penyelenggaraan perizinan usaha berbasis risiko karena menjadi acuan dalam penetapan tingkatan risiko sebuah kegiatan usaha.

Perizinan usaha berdasarkan tingkat risikonya memiliki perbedaann dalam persyaratannya. Perizinan yang telah ditetapkan berguna untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usahanya. Dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditetapkan maka akan mudah dan aman bagi pelaku usaha dalam menjalakan kegiatan usahanya. Berikut syarat yang harus dipenuhi untuk menjalankan kegiatan usahanya.

1) Perizinan usaha dengan tingkat risiko rendah berupa NIB (Nomor Induk Berusaha). NIB bagi kegiatan usaha tingkat risiko rendah berlaku juga sebagai SNI dan pernyataan jaminan halal.[32]
2) Perizinan usaha tingkat risiko dengan risiko menengah rendah dan tinggi persyaratannya berupa NIB dan sertifikat standar. Sertifikat standar membuktikan legalitas kegiatan usahanya. Sertifikat standar berupa penyataan pelaku usaha yang diberikan melalui sistem OSS.
3) Perizinan usaha dengan tingkat risiko tinggi berupa NIB dan izin. Kegiatan usaha dengan kategori tingkat risiko yang tinggi wajib memenuhi standar

[31] Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
[32] Pasal 12 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko

usaha dan standar produk. Selain itu, diwajibkan untuk memenuhi persyaratan izin lainnya seperti Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 5 Tahun 2021 bahwa pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dasar dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kemudian di Pasal 5 ayat (1) diterangkan bahwa yang menjadi persyaratan dasar dalam perizinan usaha meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.[33]

1) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

Kesesuainan kegiatan pemanfaatan ruang atau sering disebut izin lokasi merupakan kesesuaian rencana pemanfaatab ruang dalam suatu kegiatan dengan Rencana Tata Ruang (RTR). KKPR ini menjadi salah satu syarat yang digunakan untuk melakuka kegiatan usaha. Siste OSS RBA me3mberi kemudahan kepada para pelaku usaha untuk mengajukan Persetujuan KKPR (P-KKPR). Adapun yang harus dilakukan untuk meminta persetujuan ini adalah mempersiapkan koordinat titik lokasi, luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang, informasi penguasaan tanah. dan informasi tentang jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan identifikasi KBLI.[34]

---

[33] Nugraha dkk Dwiputra, *OSS RBA; Cara Baru Menurus Perizinan Berusaha Apa Dan Bagaimana OSS RBA Diterapkan Oleh Pelaku Usaha*, ed. Nurul Adhha, 1st ed. (Jogjakarta: Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia, 2023).

[34] Admin, "KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR)," Siimtaru PadangPanjang, 2022, https://simtaru.padangpanjang.go.id/beranda/detail_info_tataruang/kesesuaian-kegiatan-

2) Persetujuan lingkungan

Persetujuan atau izin lingkungan merupakan izin yang diterbitkan dan diberikan kepada pelaku usaha dengan kegiatan usaha yang memerlukan atau wajib memiliki AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan Hidup) atau UKL-UPL. Izin ini berfungsi untuk melindungi dan mengelola lingkungan agar tidak terjadi kerusakan dan membahayakan lingkungan sekitar seperti pencemaran tanah akibat limbah, polusi udara akibat asap darei cerobong industri, dan pencemaran lainnya.

Perlu diperhatikan bahwa persetujuan lingkungan hanya berlaku pada kegiatan usaha yang tingkatannya dapat menyebabkan bahaya atau kerusakan yang signifikan terhadap lingkungan hidup. Misalnya pada kegiatan usaha pertambangan yang pasti memerlukan AMDAL karena proses penambangan yang dinilai cukup membahayakan. Kemudian untuk kegiatan usaha seperti pengolahan bakery yang dinilai memiliki tingkat risiko rendah maka tidak terlalu membutuhkan AMDAL, cukup dengan membuat pernyataan mandiri dan SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

3) Persetujuan bangunan gedung (PBG)

Persetujuan bangunan gedung atau IMB (Izin Mendirikan Bangunan) merupakan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha untuk membangun tempat, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau

pemanfaatan-ruang-kkpr#:~:text=Pendaftaran dilakukan oleh pelaku usaha melalui Aplikasi,milik sendiri) * Informasi jenis Usaha (KBLI).

merawat bangunan sesuai dengan standar. PBG tidak harus diajukan saat pra-kontruksi bangunan, tetapi dapat diajukan kemudian walaupun kontruksi bangunan sudah ada. Hal ini dikarenakan PBG berfungsi sebagai perizinan yang menitikberatkan bagaimana seharusnya bangunan untuk kegiatan usaha tersebut dibangun.

4) Sertifikat laik fungsi

Sertifikat Laik Fungsi atau SLF merupakan sertifikat yang dikeluarkan dan diberikan oleh Pemenrintah untuk menilai kelaikan fungsi atas bangunan yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha. SLF menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PBG. SLF berfungsi untuk menilai kelaikan fungsi dari bangunan yang didirikan.

d. Sanksi bagi Pelanggar

Sanksi merupakan akibat yang timbul dari adanya norma atau aturan di masyarakat. sanksi akan diberlakukan kepada masyarakat yang melanggar dan tidak mentaati peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Sanksi dijadikan sebagai alat pemaksa agar norma-norma di masyarakat bisa berjalan sesuai aturan yang ada. Sanksi juga dapat digunakan sebagait alat untuk menegakkan suatu hukum, dan sanksi pasti diatur didalam peraturan perundang-undangan. Keberadaan sanksi digunakan untuk memastikan tercapainya norma hukum. Dengan kata lain sanksi merupakan alat represif bagi pelanggar peraturan yang berlaku yang merupakan akibat hukum dari suatu pelanggaran. Selain sebagai alat represif, sanksi juga sebagai alat preventif yaitu sebagai alat pencegah bagi setiap orang yang

memungkinkan untuk melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.

Di Indonesia terdapat tiga jenis sanksi yaitu sanksi pidana, administrasi, dan perdata. Untuk sanksi yang diatur dalam kebijakan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko ini, termasuk kedalam jenis sanksi administrasi. Pasalnya perizinan berusaha lebih banyak berurusan dengan hal-hal yang sifatnya administrasi. Misalnya sertifikat halal, penyataan mendapatkan NIB, dan masih banyak lainnya. NIB pelaku usaha akan berwujud sebuah dokumen resmi dari pemerintah.

Adapun sanksi, diberikan kepada masyarakat atau pelaku usaha yang enggan untuk mendaftarkan izin usahanya adalah sebagaimana pada pasal 405 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 bahwa setiap pelaku usaha yang tidak memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko khususnya di bidang industri, maka akan dikenai sanksi administrasi berupa:

1) Peringatan Tertulis
2) Denda Administrasi
3) Penutupan sementara

3. Teori Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen[35]. Jelasnya

[35] Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

perlindungan konsumen adalah suatu usaha untuk melindungi setiap orang yang memakai suatu produk barang dan/atau jasa yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga, maupun makhluk hidup lainnya. Istilah perlindungan konsumen digunakan untuk menggambarkan bahwa setiap makhluk yang hidup berhak untuk mendapatkan suatu perlindungan dari halhal yang merugikan ketika suatu barang produk dan/atau jasa digunakan untuk memenuhi hajatnya. Perlindungan konsumen adalah suatu upaya yang digunakan untuk menjamin keselamatan seorang konsumen dalam menggunakan suatu produk barang dan/atau jasa. Dalam rangka melindungi konsumen dari bahaya penggunaan suatuu produk maka diciptakannya sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Dengan adanya peraturan ini akan lebih lebih terjamin perlindungan terhadap konsumen.

Peraturan perundang-undangan Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dibuat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, kesadaran dan kemandirian seorang konsumen untuk melindungi diri, melindungi konsumen dengan cara menghindarkan dari hal yang negatif atas pengunaan barang dan/atau jasa, meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang dapat menjamin kelangsungan usaha produksi barang, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Salah satu bentuk atau upaya pelaku usaha dalam mewujudkan perlindungan konsumen adalah dengan mendaftarkan sertifikasi halal. Tanda legalitas ini menjadi bukti bahwa

produk tersebut aman dikonsumsi dan telah diproses sesuai dengan standar kesehatan yang ada.

Sertifikat halal menjadi wujud perlindungan konsumen. sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 bahwa sertifikat halal menjadi tanda pengakuan kehalalan suatu produk yang didasarkan pada fatwa halal yang dikeluarkan MUI.[36] Adanya motivasi dari pelaku usaha untuk menjaga kualitas

b. Hak dan Kewajiban Konsumen

Mengenai hak dan kewajibam dari seorang konsumen telah diatur dalam Pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

1) Hak Konsumen
   a) Mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk.
   b) Memilih dan mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar dan keadaan serta jaminan produk.
   c) Mendapatkan informasi yang jelas, benar dan jujur dari produk yang digunakan.
   d) Mendapatkan hak untuk menerima keluhan dan pendapat dari barang yang digunakan
   e) Mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa secara patut.
   f) Mendapatkan pendidikan dan pembinaan konsumen.

[36] Pasal 1 ayat 1o Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

g) Mendapatkan pelayanan dan perlakuan yang benar dan tidak diskriminatif.

h) Mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialami akibat penggunaan produk atau adanya ketidaksesuaian produk yang diterima.

2) Kewajiban Konsumen

a) Wajib membaca dan mengikuti petunjuk yang diinformasikan mengenai penggunaan atau pemanfaatan produk demi tercipta keamanan dan keselamatan.

b) Beriktikad baik saat melakukan transaksi pembelian produk.

c) Melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan jumlah nilai tukar.

d) Mengikuti prosedur penyelesaian sengketa secara patut.

c. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.

Selain hak dan kewajiban dari seorang konsumen, pelaku usaha sebagai produsen yang memproduksi barang dan/atau jasa untuk konsumen juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban bagi pelaku usaha diatur dalam pasal 6 dan pasal 7 UU Nomor 8 tahun 1999.

1) Hak Pelaku Usaha

a) Menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

b) Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak memiliki iktikad baik.

c) Hak untuk melakukan pembelaan diri dalam penyelesaian sengkea dan mendapatkan rehabilitasi nama baik apabila secara hukum terbukti bahwa kerugian tidak disebabkan oleh produk yang diperdagangkan.

2) Kewajiban Pelaku Usaha

a) Memiliki iktikad baik dalam melakukan kegiatan usaha.

b) Memberikan informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai barang yang diperdagangkan dan memberikan informasi tentang penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.

c) Melayani dan memperlakukan konsumen dengan baik serta tidak diskriminatif.

d) Menjamin mutu atau kualitas produk yang diperdagangkan berdasarkan standar mutu yang berlaku.

e) Memberi kesempatan konsumen untuk menguji, mencoba, serya memberi jaminan atau garansi atas produk yang diperdagangkan.

f) Memberi kompensasi atau ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan produk yang diperdagangkan.

g) Memberi kompensasi atau ganti rugi jika produk yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan yang mengkaji kesesuaian antara teori atau data sekunder dengan peristiwa atau kondisi nyata di lapangan sesuai dengan sifat hukum yang dibuat dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini mengkaji kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai hukum normatif yang diberlakukan untuk pelaku usaha. Dengan kata lain, penelitian ini dilakukan dengan melihat keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan dan menemukan fakta.

B. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang mempelajari pengaruh hukum terhadap masyarakat. pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris yang dilakukan dengan terjun langsung ke objeknya. Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang menjadi awal atau pedoman, kemudian beralih pada data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan atau masyarakat yang menjadi objeknya.[37]

[37] setya risky Rahmadani, "Metode Penelitian," *Metode Penelitian*, 2018, http://repository.stei.ac.id/8152/4/BAB 3.pdf.

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara yang hasil wawancara tersebut akan dianalisi menggunakan data sekunder berupa PP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

C. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Home Industri Kerupuk Kali Dusun Nglongah Lor, Desa Sumberingin, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena terdapat 6 pelaku usaha kerupuk kali yang telah berdiri sejak puluhan tahun namun belum mengantongi izin usaha.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer : data primer diperoleh melalui penelitian langsung ke masyarakat. Penelitian langsung ke masyarakat dilakukan dengan wawancara kepada pelaku UMKM Kerupuk Kali di Dusun Nglongah Lor. Dalam penelitian ini data primer diambil dari seluruh pelaku usaha mkro Kerupuk Kali yang berjumlah enam pelaku usaha dan lima konsumen kerupuk kali. Wawancara akan dilakukan dengan menanyakan seberapa jauh pegetahuan pelaku usaha terhadap Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan kepatuhan terhadap perizinan usaha yang pada dasarnya menjadi kewajiban pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha. selanjutnya hasil wawancara akan di analisis menggunakan teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

2. Data sekunder : data sekunder diperoleh melalui penelaahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan skripsi/jurnal ilmiah, kamus, ensiklopedia, dan lainnya.

   Adapun dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja (Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang), Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan ini akan dijadikan sebagai pisau analisis hasil dari data primer yang didapatkan.

E. Metode pengumpulan data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab langsung kepada narasumber atau informan guna menggali informasi, sehingga data yang dibutuhkan oleh peneliti didapatkan dengan valid dan akan diolah dan dideskripsikan sesuai dengan kondisi di lapangan. Wawancara akan dilakukan terhadap 6 pelaku usaha mikro Kerupuk Kali di Dusun Nglongah Lor, Desa Sumberingin, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek dan 5 konsumen kerupuk kali.

F. Metode pengelolaan data

1. Pemeriksaan data

   Pemeriksaan data bertujuan untuk menyesuaikan data, melihat kejelasan data, serta kelengkapan data yang akan digunakan sebagai panduan wawancara di lapangan. Proses ini memastikan kevalidan data atau kesesuaian catatan apakah sudah cukup dan sesuai dengan tema penelitian dan digunakan untuk wawancara terhadap para pelaku usaha mikro Kerupuk Kali Di Dusun Nglongah Lor, Kabupaten Trenggalek.

2. Klasifikasi

   Tahapan yang kedua digunakan untuk mengelompokkan data dan memilah data untuk dijadikan bahan yang akan dijelaskan dalam penelitian dan disesuaikan dengan pembahasan yang akan dibahas. Data yang telah diperoleh dari keenam pelaku usaha mikro Kerupuk Kali akan dikelompokan menjadi pokok pembahasan dan variabel dari penelitian. Misalnya mengelompokkan data hasil wawancara dengan peraturan perundang-undangan dan teori yang digunakan sebagai pisau analisis penelitian.

3. Analisis Data

   Tahapan keempat menjadi tahapan yang penting dalam penelitian ini karena akan mengolah data primer dan data sekuder menjadi pembahasan yang jelas, proporsional, dan tepat berdasarkan hasil dari narasumber yang akan di analisis dengan teori kesadaran hukum terhadap perizinan berusaha berbasis risiko. Proses pengolahan

akan dimulai dengan mengumpulkan data terkait dengan kebijakan perizinan usaha berbasis risiko, kebijakan atau wujud perlindungan konsumen oleh pelaku usaha, dan kesadaran hukum. Setelah itu, data akan dianalisis untuk menemukan sesuatu yang menyimpang dari norma.

4. Simpulan

Tahapan yang terakhir adalah kesimpulan dari hasil analisis pembahasan yang berkorelasi antara hasil penelitian dilapangan dengan analisis terhadap norma hukum dan teori yang dijabarkan dengan singkat dan jelas yaitu Kesadaran Hukum Pelaku UMKM terhadap Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kerupuk Kali di Dusun Nglongah Lor, Kabupaten Trenggalek terhadap Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko.

Kesadaran hukum seseorang dapat dinilai melalui beberapa indikator. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa terdapat empat indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan tentang hukum, pemahaman tentang hukum, sikap terhadap hukum, dan perilaku hukum. Tinggi rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat diukur berdasarkan berlakunya suatu hukum dimasyarakat. Untuk mengetahui dan menilai kesadaran hukum pelaku usaha kerupuk kali di Dusun Nglongah Lor, maka harus memenuhi empat indikator berikut.

1. Pengetahuan tentang hukum. Pengetahuan hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang hal yang dilarang dan hal yang diperbolehkan.

   Dalam penelitian ini, pengetahuan yang dimaksudnya mengenai adanya regulasi peraturan yang mengatur tentang perizinan berusaha yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam penelitian ini maka berkenaan dengan pengetahuan seseorang terhadap kewajiban untuk mendaftarkan izin usahanya. sebagaimana dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 menyebutkan bahwa “Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha,

pelaku usha wajib memenuhi: a) persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau b) perizinan berusaha berbasis risiko. Adanya kewajiban ini maka bagi pelaku usaha yang tidak menjalankan sebagaimana dalam pasal 4 dapat dikenai sanksi. Sanksi yang akan diterapkan kepada pelaku usaha khususnya di bidang industri adalah peringatan tertulis, denda administrasi, dan penutupan sementara. Sanksi-sanksi ini tertera dalam pasal 405 PP Nomor 5 tahun 2021.

Namun, sebelum menginjak pada tahap pengetahuan tentang isi dari suatu peraturan, seseorang harus mengetahui bahwa ada peraturan yang mengatur suatu hal. Dalam penelitian ini maka pelaku usaha mikro kerupuk kali di Dusun Nglongah Lor harus mengetahui bahwa ada peraturan yang mengatur tentang perizinan berusaha berbasis risiko. Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pelaku usaha kerupuk kali, mereka sama sekali tidak mengetahui bahwa ada peraturan tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Ada dua pelaku usaha yang sekedar mengetahui izin usaha saja. Mereka tidak mengetahui bahwa saat ini pemerintah menerapkan perizinan berusaha dinilai berdasarkan tingkat risiko yang kemungkinan muncul akibat kegiatan usaha yang dijalankan dan perizinan berusaha ini diwajibkan untuk setiap pelaku usaha baik pada setiap tingkatannya termasuk tingkat mikro.

Jika dilihat dari perspektif perlindungan konsumen, pelaku usaha kerupuk kali di Dusun Nglongah juga belum menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap keamanan, kenyamanan, dan keselamatan

konsumen. Sebagaimana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 7 huruf (d) bahwa terkait dengan kewajiban seorang pelaku usaha terhadap konsumen untuk menjaga mutu dari produk yang diedarkan. Hal ini dapat diwujudkan melalui kepemilikan sertifikat halal, namun pada pelaku usaha kerupuk kali di Dusun Nglongah Lor ini tidak memiliki sertifikat halal.

Ketidaktahuan pelaku usaha Kerupuk Kali berdasarkan hasil wawancara kepada 6 pelaku UMKM Kerupuk Kali yang mengatakan :

Narasumber ke-1:
"Iya tau kalau usaha itu harus izin. Cuma kalau aturannya, undang-undangnya belum tau".[38]

Narasumber ke-2 :
"belum tahu tentang perizinan itu. bagi kita ini hanyalah usaha sampingan. Usaha yang dijalankan juga kecil, jadi menurut saya tidak perlu izin-izin usaha itu".[39]

Narasumber ke-3:
"belum tahu tentang izin-izin itu, ya karena cuma usaha kecil-kecilan. Yang penting bisa setor ke penjual walaupun sedikit".[40]

Narasumber ke-4:
"apa mbak izin-izin. Tidak tahu izin usaha, pokoknya bisa setor dan jualan sudah alhamdulillah. Ini itu Cuma usaha kecil-kecilan".[41]

Narasumber ke-5:
"iya tau dengar-dengar gitu mbak. Tapi yang dengar kalau ada izin usaha. kalau peraturannya tidak tau".[42]

[38] Ibu Pujiatmi, wawancara (Nglongah Lor, 5 Oktober 2024)
[39] Ibu Sarti, wawancara (Nglongah Lor, 05 Oktober 2024)
[40] Ibu Indiah, wawancara (Nglongah Lor, 05 Oktober 2024)
[41] Bapak Teguh, wawancara (Nglongah Lor, 05 Oktober 2024)
[42] Bapak Suparno, wawancara (Nglongah Lor, 05 Oktober 2024)

Narasumber ke-6:
"enggak tau mbak. Taunya ya produksi terus disetorkan ke penjual".[43]

2. Pemahaman tentang hukum. Pemahaman hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut. Dalam hal ini, seseorang tidak disyaratkan untuk mengetahui adanya peraturan tertulis yang mengatur suatu hal. Pemahaman terhadap hukum dapat dinilai melalui sikap pelaku usaha kerupuk kali dalam menghadapi norma-norma yang berlaku. Pelaku usaha Kerupuk Kali di Dusun Nglongah Lor dinilai paham hukum ketika mereka dengan mudah mengerti regulasi tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan apa kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha.

   Hasil dari wawancara yang dilakukan, ternyata semua pelaku UMKM Home Industri Kerupuk Kali di Dusun Nglongah Lor tidak mengetahui isi, tujuan, dan manfaat daripada aturan PP Nomor 5 tahun 2021. Pelaku usaha Kerupuk Kali tidak mengetahui manfaat dari adanya penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis. Tidak hanya perizinan berusaha berbasis risiko, pemahaman pelaku usaha Kerupuk Kali di Dusun Nglongah Lor terhadap sertifikat halal juga tidak terlihat. Namun, berdasarkan informasi dari salah satu narasumber mengatakan pernah ada upaya dari pihak terkait untuk melakukan jemput bola untuk mendaftarkan sertifikat halal. Akan tetapi, pengakuan beliau tidak ada tindak lanjut terkait

[43] Bapak Sarkun, wawancara (Nglongah Lor, 07 Oktober 2024)

sertifikat ini. Pelaku usaha juga tidak ada inisiatif untuk menanyakan lebih lanjut terkait sertifikat halal ini. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman mereka tentang fungsi dan manfaat daripada sertifikat halal.

Narasumber ke-3 : *"ndak ada mbak sosialisasi dan informasi tentang izin usaha, kalaupun ada ya pasti tau. Tapi dulu pernah ada yang datang menawarkan bantuan untuk daftar sertifkat halal, tapi sampai saat ini sertifikatnya belum ada".*[44]

3. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum. Sikap hukum melibatkan pilihan seseorang terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada dirinya. Berdasarkan hasil wawancara sikap pelaku usaha kerupuk kali di Dusun Nglongah Lor, mereka cenderung menolak kewajiban perizinan berusaha berbasis risiko. Sedikit informasi telah diberikan kepada pelaku usaha kerupuk kali bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk mendaftarakan izin usahanya dan sanksi yang akan diberikan ketika pelaku usaha tidak mendaftarakan izin usahanya belum menjadi pemantik ketakutan mereka terhadap sanksi tersebut. Para pelaku usaha kerupuk kali cenderung tak acuh atau tidak peduli dengan keberadaan peraturan ini. Berbagai alasan yang muncul dari mereka sehingga mereka enggan mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, berbagai alasan para pelaku usaha kerupuk kali enggan mendaftarkan izin usahanya.

Narasumber ke-1:

[44] Ibu Indiah, wawancara (05 Oktober 2024)

"izin usaha pasti pengurusannya rumit, susah. Tidak ada yang paham tentang itu, jadi ya sudah tidak perlu izin. Lagipula setelah ini tidak ada yang mau meneruskan usaha ini. Dan nanti pasti membayar pajak kan"[45]

Narasumber ke-2:

"nanti kalau teman yang lain daftar izin usaha, juga ikut daftar".[46]

Narasumber ke-4:

"Tidak perlu izin mbak, hanya usaha kecil-kecilan dan rumahan. Menggoreng kerupuknya pun tidak setiap hari. Hanya di waktu tertentu".[47]

4. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhinya. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko belum berlaku di Dusun Nglongah Lor. Kewajiban untuk mendaftarkan izin kegiatan usaha yang diatur pada pasal 4 tidak dijalankan oleh keenam pelaku usaha kerupuk kali. Hal ini dibuktikan dengan keenam pelaku usaha UMKM Kerupuk Kali tidak memiliki izin usaha dan tidak memiliki NIB.[48] Padahal dengan jelas pasal 4 PP Nomor 5 tahun 2021 mewajibkan bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan izin usahanya walaupun kegiatan usaha tersebut memiliki tingkat risiko yang rendah dan tergolong usaha mikro.

[45] Ibu Pujiatmi, wawancara (Nglongah Lor, 05 Oktober 2024)
[46] Ibu Indiah, wawancara (Nglongah Lor, 05 Oktober 2024)
[47] Bapak Teguh, wawancara (Nglongah Lor, 05 Oktober 2024)
[48] Ibu Indiah, wawancara (Nglongah Lor, 05 Oktober 2024)

Jika dikaitkan dengan perlindungan konsumen, pelaku usaha kerupuk kali di Dusun Nglongah Lor juga belum memiliki kesadaran terkait perlindungan konsumen. Adanya perizinan berusaha berbasis risiko secara tidak langsung menjadi bentuk perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah kepada pelaku usaha maupun konsumen. Semua kegiatan usaha baik mikro maupun makro dan yang memiliki tingkat risiko rendah maupun tinggi diwajibkan untuk mendaftarkan izin usahanya. Usaha kerupuk kali ini tergolong jenis usaha dengan tingkat risiko yang rendah. Oleh karena itu, sesuai dengan pasal 12 PP Nomor 5 tahun 2021, kepemilikan NIB (Nomor Induk Berusaha) selain sebagai tanda legalitas usaha juga berfungsi sebagai SNI (Standar Nasional Indoneisa) dan pernyataan jaminan halal.

Jaminan halal sendiri dapat juga dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat halal. Adanya sertifikat halal menjadi bukti bahwa barang yang di produksi terjamin kualitas dan keamanannya, sehingga akan menciptakan kenyamanan dan keselamatan bagi konsumen. sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen memiliki hak untuk kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Dalam konteks ini, keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pangan yang dimaksudkan untuk menjaga pangan agar tetap aman, higienis, terhindar dari bahan yang dapat membawa dampak buruk bagi kesehatan manusia, dan tidak bertentangan dengan agama misalnya mengandung sesuatu yang haram seperti khamr, sesuatu hal yang

merusak dan membahayakan. Kemudian pada pasal 7 huruf d menyebutkan pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi sesuai dengan standar yang diberlakukan oleh pemerintah. Perwujudkan pasal ini dapat dilakukan oleh pelaku usaha dengan mendaftarkan izin usahanya atau dengan kepemilikan sertifikat halal/jaminan mutu halal. Adanya tanda daftar usaha atau NIB bagi pelaku usaha dengan tingkat risiko rendah serta kepemilikan sertifikat halal menjadi bukti bahwa pelaku usaha bertanggungjawab terhadap produk yang diedarkan dan menjamin keamanan bagi pelanggan.

Cara pengolahan akan menjadi penilaian tingkat ke-higienitas produknya. Pelaku usaha juga perlu memperhatikan bahan yang digunakan dalam proses produksi. Bahan-bahan yang digunakan ini harus betul-betul diperhatikan agar produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan aman untuk dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Misalnya memperhatikan jenis garam dan pewarna makanan yang digunakan. Hal ini perlu dan sangat diperhatikan karena pasti ada orang-orang yang menghindari produk dengan kandungan tertentu dan bagaimana proses pengolahan untuk menjadi produk siap makan karena memiliki alergi atau penyakit tertentu yang mengakibatkan orang tersebut menghindari produk makanan itu.

Untuk pengolahan kerupuk kali setengah jadi menjadi makanan jadi, kebanyakan dari konsumen lebih sering mengkonsumsi kerupuk yang di olah dengan cara digoreng menggunakan pasir. Walaupun dianggap lebih aman menggunakan pasir daripada minyak, tetap perlu memperhatikan kandungan-

kandungan yang ada dalam pasir dan bahan yang digunakan untuk memproduksi kerupuk, serta tingkat keamanan bagi kesehatan jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang.

Untuk pengolahan kerupuk kali mentah menjadi matang juga harus diperhatikan khususnya media yang digunakan yaitu pasir. Hal ini dikarenakan kandungan yang ada pada pasir bisa saja berpengaruh pada kesehatan konsumen. Pasir yang digunakan perlu diolah supaya dapat dipastikan bersih dan aman digunakan. Agar pasir benar-benar aman maka perlu beberapa proses yang dilakukan yaitu pencucian, perebusan, pengeringan, dan penyaringan.[49] Setelah dilakukan wawancara dengan beberapa konsumen, mereka menyatakan jika pernah memakan kerupuk yang tertempel dengan pasir. Hal ini mengakibatkan pasir yang menempel pada kerupuk tadi masuk kedalam tubuh konsumen. Ini menjadi sesuatu yang wajib diperhatikan saat menggoreng kerupuk agar kualitas dari produk itu sendiri dan aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan konsumen selalu terjaga. Hasil wawancara dari salah satu konsumen juga mengatakan jika mengkonsumsi kerupuk kali yang digoreng dengan pasir ini secara berlebih dapat melukai dan mengganjal dimulut. Sebagaimana wawancara terhadap saudari Irma Desisca, mengatakan: "*pernah beli kerupuk ini. Tapi tidak setiap hari mengkonsumsi karena terhadap kerupuk yang dimakan itu bisa lengket dimulut. Tapi ada sebagian yang tidak. Dan beberapa itu masih ada pasir yang menempel meskipun sedikit"*.[50] Hal ini

[49] Dr.Nadia Nurotul Fuadah, "Amankah Menggoreng Kerupuk Dengan Pasir?," Alodokter, 22AD, https://www.alodokter.com/komunitas/topic/amankah-menggoreng-kerupuk-dengan-pasir-.
[50] Irma Desisca, wawancara (20 November 2024)

menjadi bukti bahwa tidak semua kerupuk memiliki kualitas yang sama dan kurangnya perhatian atas kualitas produk.

Dalam konteks ini, pelaku usaha UMKM Kerupuk Kali harus memberikan informasi yang jelas tentang bahan-bahan yang dipakai untuk mengelola produknya. Jika dilihat melalui perspektif hukum Islam, maka salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah memberi informasi tentang komposisi atau bahan yang digunakan dalam pembuatan Kerupuk Kali. Hal ini dilakukan untuk mencapai kemaslahatan yang diartikan sebagai bentuk atau upaya menjaga keselamatan konsumen agar terhindar dari sesuatu yang dapat menimbulkan kerusakan, seperti kerusakan yang ditimbulkan akibat kandungan zat pewarna atau pengawet yang berbahaya bagi kesehatan, media yang digunakan dalam proses pengolahan, dan harus benar-benar memperhatikan kualitas produk yang diperjualbelikan.

Perlindungan konsumen sejalan dengan konsep kemaslahatan yang memperhatikan kenikmatan, kesenangan, dan mendatangkan kebaikan. Hal ini berhubungan dengan hukum syara yang memiliki tujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturuan dan harta. Jika dilihat dari konteks ini maka menjaga kualitas produk dengan memperhatikan bahan yang digunakan dan menjaga kehigienisan Kerupuk Kali menjadi upaya untuk menjaga kesehatan atau dalam konteks *al-maslahah* berguna untuk memelihara jiwa atau diri atau kehidupan.

B. Faktor-Faktor Ketidaksadaran Hukum Pelaku UMKM Kerupuk Kali Di Dusun Nglongah Lor terhadap Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Berdasarkan hasil wawancara, pelaku usaha Kerupuk Kali di Dusun Nglongah Lor, Kabupaten Trenggalek tmenunjukkan ketidaksadaran hukum terhadap penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Hasil wawancara tersebut akan dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2
Indikator Ketidaksadaran Hukum

No	Indikator Ketidaksadaran Hukum	PU.1	PU.2	PU.3	PU.4	PU.5	PU.6
1.	Ketidaktahuan terhadap penyelenggaraan berusaha berbasis risiko	√	√	√	√	√	√
2.	Ketidakpahaman terhadap penyelenggaraan berusaha berbasis risiko	√	√	√	√	√	√
3.	Sikap negatif terhadap hukum	√	√	√	√	√	√
4.	Perilaku hukum yang negatif	√	√	√	√	√	√

KETERANGAN:
PU = Pelaku Usaha

Dari Tabel 2 tersebut dapat diketahui bahwa pelaku usaha mikro Kerupuk Kali tidak memahami dan mengetahui bahwa ada peraturan tentang perizinan berusaha berbasis risiko yang sangat relevan dengan risiko-risiko

yang kemungkinan muncul akibat dari kegiatan usaha yang dijalankan. Penyebab ketidaksadaran hukum pelaku usaha mikro kerupuk kali terhadap penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dikarenakan beberapa faktor meliputi:

1. Faktor penegak hukum. Faktor utama yang mempengaruhi pelaku usaha Kerupuk Kali ini tidak memiliki izin usaha karena ketidaktahuan terkait perizinan berusaha berbasis risiko. Berdasarkan wawancara, tidak pernah ada sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa setempat terkait dengan informasi mengenai perizinan berusaha. Ketidaktahuan ini mempengaruhi pemahaman dan sikap para pelaku usaha Kerupuk Kali terhadap penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko membuktikan kurang adanya pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah setempat terhadap pelaku usaha Kerupuk Kali di Dusun Nglongah Lor. Selain itu, tidak adanya tindakan tegas atau sanksi dari pihak berwenang yang diberikan kepada pelaku usaha Kerupuk Kali di dusun ini menjadi penyebab pelaku usaha memiliki pola pikir yang negatif. Mereka cenderung tak acuh dan menyepelekan kewajiban akan mendaftarkan izin usahanya. Padahal di PP Nomor 5 tahun 2021 pasal 405 Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diberlakukan sanksi hukum kepada pelaku UMKM khususnya yang bergerak dibidang industri bahwa: “Setiap pelaku usaha disektor perindustrian yang tidak memiliki Perizinan Berusaha Industri akan dikenai sanksi administrasi

berupa: (a) peringatan tertulis; (b) denda adminitrasi; dan/atau (c) penutupan sementara".

2. Faktor pengetahuan hukum. Pengetahuan tentang hukum menjadi poin utama yang menjadi langkah awal pembentukan kesadaran masyarakat terhadap hukum itu. Para pelaku usaha kerupuk kali tidak mengetahui bahwa ada peraturan khusus yang mengatur tentang perizinan berusaha berbasis risiko yaitu PP Nomor 5 tahun 2021. Ketidaktahuan ini yang menjadi penyebab pelaku usaha kerupuk kali tidak mendaftarkan izin usahanya. Tidak adanya sosialisasi dan inforormasi menjadi penyebab ketidaktahuan pelaku usaha kerupuk kali terhadap peraturan ini.
3. Faktor internal. Faktor internal dapat berupa pola pikir masyarakat terhadap peraturan tersebut. Selain itu, tingkat pendidikan juga akan berperngaruh pada pengetahuan seseorang. Pendidikan dan pola pikir pelaku usaha di Dusun Nglongah juga menjadi faktor ketidaksadaran hukum terhadap perizinan berusaha berbasis risiko. Pola pikir yang rendah menyebabkan pelaku usaha kerupuk kali enggan untuk mendaftarkan izin usahanya. Mereka hanya menganggap bahwa usaha yang dijalankan hanya usaha kecil-kecilan sehingga tidak memerlukan izin usaha.

Motivasi paling dasar diantara tiga faktor yaitu *compliance, identification*, dan *internalization* masih belum menjadi pemantik bagi pelaku usaha UMKM Kerupuk Kali di Dusun Nglongah Lor ini untuk mengajukan izin usaha berbasis risiko. Bahkan, pelaku usaha UMKM di Dusun Nglongah Lor ini tidak memiliki rasa takut terhadap sanksi dari pemerintah yang akan

diberikan kepada pelaku usaha UMKM apabila belum mendaftarkan izin usahanya. Hal ini berdasarkan hasil wawancara kepada pelaku UMKM Kerupuk Kali yang enggan untuk mendaftarkan izin usahanya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, para pelaku UMKM Kerupuk Kali belum memiliki legalitas usaha atau tidak memiliki izin usaha. Padahal, kegiatan usaha ini sudah berjalan lama dan menghasilkan produk yang cukup banyak dalam sehari. Berdasarkan hasil wawancara, masih banyak masalah yang muncul oleh pelaku usaha UMKM Kerupuk Kali terkait dengan perizinan berusaha berbasis risiko. Masalah yang terjadi karena ketidaktahuan pelaku usaha UMKM Kerupuk Kali terhadap regulasi atau peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan ketidaktahuan terkait sistem OSS.

Keempat indikator kesadaran hukum menjadi acuan untuk menilai sejauh mana kesadaran pelaku usaha Kerupuk Kali di dusun Nglongah Lor terhadap Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Ternyata semua pelaku usaha Kerupuk Kali di Dusun Nglongah Lor ini memiliki level pengetahuan yang rendah terkait dengan perizinan berusaha berbasis risiko. Pemicunya karena tidak ada motivasi atau dorongan yang dapat menyadarkan pelaku Kerupuk Kali. Misalnya takut akan sanksi. Mereka menganggap izin usaha tidak berpengaruh pada usaha mereka. Selama berjalannya usaha ini tidak ada tindak lanjut atau sanksi yang diberikan kepada pihak terkait kepada mereka sebagaimana pasal 405 PP Nomor 5 tahun 2021. Hal inilah yang membentuk

rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha UMKM Kerupuk Kali di Dusun Nglongah terhadap perizinan berusaha berbasis risiko. Selain itu, kurangnya informasi juga mengakibatkan rendahnya kesadaran hukum terhadap penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko ini. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan hubungan antara pihak terkait dengan pelaku usaha yang dapat dilakukan dengan memberikan informasi dan sosialisasi terkait perizinan berusaha berbasis risiko.

Kemudian, bagi pelaku usaha UMKM yang memiliki tingkat risiko rendah, sebagaimana Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 menjelaskan bahwa NIB (Nomor Induk Berusaha) menjadi identitas bagi pelaku usaha sekaligus berlaku untuk SNI (Standar Nasional Indonesia) dan pernyataan jaminan halal. Standarisasi yang diberlakukan pasti menjadi acuan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan konsumen ketika menggunakan atau mengkonsumsi suatu produk. Hal ini sejalan dengan tanggung jawab sebagai pelaku usaha untuk menjamin keamanan dan keselamatan produk yang akan diedarkan khususnya yang dapat berpengaruh langsung pada kesehatan.

Jika ditilik dari pengetahuan hukum tentang jaminan produk halal yang menjadi substansi hukum terkait perizinan berusaha berbasis risiko, maka sebenarnya telah ada upaya pemberian bantuan dari pihak terkait mengenai sertifikat halal. Namun, tidak ada tindak lanjut dari pihak tersebut dan pelaku usaha UMKM Kerupuk Kali di Dusun Nglongah Lor pun tidak termotivasi untuk menindaklanjuti karena tidak mengetahui tentang fungsi dan kegunaan serta kewajiban kepemilikan sertifikat halal dengan baik. Hal ini didasarkan

pada hasil wawancara dengan pelaku usaha UMKM Kerupuk Kali yaitu Ibu Indiah, beliau mengatakan: *"tidak tau tentang sertifikat halal. Tapi dulu pernah ada orang yang datang ke sini dan menawarkan bantuan untuk mendaftarkan sertifiat halal. Dan kami meng-iyakan bantuan tersebut. Tapi sampai saat ini sertifikatnya belum juga ada".*[51] Dari pihak yang berwenang tidak ada tindaklanjut mengenai sertifikat halal ini. Para pelaku usaha pun tidak memiliki inisiatif untuk menanyakan kepada pihak yang berwenang. Oleh karenanya, ini bertentangan dengan pasal 4 huruf (a) UU Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang sebenarnya pasal ini juga berkaitan dengan pengolahan atau tata cara pembuatan produk Kerupuk Kali.

Oleh karena itu, kepemilikan NIB (Nomor Induk Berusaha) dan sertifikat halal menjadi kewajiban bagi pelaku usaha khususnya pelaku UMKM Kerupuk Kali ini. Sertifikat halal menjadi bukti bahwa usaha memiliki tanggung jawab terhadap produk yang diedarkan, khususnya produk yang akan berpengaruh pada kesehatan. Sebagaimana dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal menerangkan bahwa "produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajiab bersertifikat halal".[52]

[51] Wawancara, Ibu Indiah (Trenggalek, 05 Oktober 2025)
[52] Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Sehubungan dengan ini, bagi pelaku usaha kerupuk kali, NIB (Nomor Induk Berusaha) dan sertifikat halal memiliki peran penting bagi keberlangsungan usahanya. Kepemilikan NIB dan sertifikat halal menjadi tanda kesadaran dan ketaatan hukum serta wujud tanggungjawab pelaku usaha atas perlindungan konsumen. Walaupun beberapa diantara mereka lebih memilih untuk menunggu atau jemput bola dari pihak, tetapi mereka memiliki itikad baik untuk mendaftarkan sertifikat halal yang pastinya akan berguna bagi keberlangsungan kegiatan usahanya dan keberlangsungan konsumen. Alasan para pelaku usaha tidak mendaftarkan izin usahanya karena beberapa faktor yaitu: (1) tidak ada penerus untuk kegiatan usaha; (2) tergolong kegiatan rumahan/mikro; dan (3) sekedar usaha sampingan. Dengan demikian, tingkat kesadaran dan motivasi pelaku usaha Kerupuk Kali di Dusun Nglongah Lor masih rendah. Oleh karena itu, perlunya meningkatkan kesadaran dan dorongan motivasi pada diri agar peraturan-peraturan yang berlaku dapat diterapkan dengan baik di lingkungan usaha, khususnya mengenai perizinan berusaha berbasis risiko.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang penulis lakukan terhadap kesadaran hukum pelaku UMKM Kerupuk Kali di Dusun Nglongah Lor, Desa Sumberingin, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek terhadap Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Keenam pelaku usaha di Dusun Nglongah Lor masih memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah terhadap penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Keempat indikator kesadaran hukum yang meliputi pengetahuan tentang hukum, pemahaman tentang hukum, sikap terhadap hukum, dan perilaku hukum terhadap penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko belum terpenuhi oleh pelaku usaha kerupuk kali di Dusun Nglongah Lor. Pelaku usaha kerupuk kali di Dusun Nglongah Lor cenderung acuh dan enggan untuk mendaftarkan izin usaha. Keenam pelaku usaha Kerupuk Kali di Dusun Nglongah Lor juga memiliki kesadaran hukum yang rendah terhadap perlindungan konsumen. Mereka tidak mengetahui dan tidak memahami hubungan NIB dengan perlindungan konsumen sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 12 PP Nomor 5 tahun 2021. Mereka juga tidak mengetahui regulasi UU Perlindungan Konsumen dan juga tidak mengetahui mengenai sertifikat halal. Sebagaimana pasal 4 huruf (a) dan pasal 7

huruf (d) yang mengatur bahwa barang yang diedarkan harus memenuhi standar yang telah ditentukan dan terjaga keamanan, kenyamanan, dan keselamatan ketika barang tersebut dikonsumsi.

2. Faktor yang menjadi penyebab rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha kerupuk kali di Dusun Nglongah Lor tentang perizinan berusaha berbasis risiko karena tidak ada sosialisasi dari pemerintah setempat dan tidak adanya tindakan tegas atau sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha meskipun kegiatan usaha ini telah berdiri sejak puluhan tahun. Ini menjadi penyebab utama pembentuk ketidaksadaran hukum pelaku usaha terhadap perizian berusaha berbasis risiko. Selain itu, faktor lain yang menjadi penyebab ketidaksadaran hukum pelaku usaha di Dusun Nglongah Lor ini karena rendahnya tingkat pendidikan dan pola pikir pelaku usaha serta kurangnya dorongan atau motivasi yang mampu menggerakkan kesadaran mereka untuk mendaftarkan izin usahanya. Diantaranya karena tidak ada yang akan meneruskan izin usaha, pengurusan izin usaha yang sulit, usaha yang dijalankan sekedar usaha kecil-kecilan atau rumahan. Ini menjadi bukti adanya demotivasi pada pelaku usaha kerupuk kali sehingga menyebabkan mereka enggan untuk mendaftarakan izin usahanya dan terlihat bahwa para pelaku usaha kerupuk kali di Dusun Nglongah Lor bersikap negatif terhadap hukum karena tidak ingin membayar pajak.

B. Saran

1. Bagi pelaku usaha disarankan untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya perizinan usaha dan pendaftaran sertifikasi halal. Kesadaran dapat melalui pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perizinan usaha. ini dapat diakses melalui beberapa cara seperti internet atau sosial media lainnya. Dengan demikian, segala informasi terkait izin usaha dapat diakses dan diketahui para pelaku usaha khususnya pelaku UMKM Kerupuk Kali di Dusun Nglongah Lor.
2. Bagi pemerintah setempat harus sering mengadakan sosialisasi terkait dengan perizinan usaha untuk menumbuhkan motivasi masyarakat khususnya pelaku usaha UMKM Kerupuk Kali agar mematuhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Jika diperlukan, pemerintah setempat melakukan sidak keliling ke desa-desa untuk mengetahui pelaku-pelaku usaha yang memiliki potensi berkembang dengan baik dan belum memiliki izin usaha serta sertifikat halal. Juga membantu pelaku UMKM Kerupuk Kali dalam mengurus legalitas atau perizinan usaha. Dengan adanya usaha ini bisa menjadi pemicu motivasi pelaku usaha untuk menggali informasi terkait perizinan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

A'la, Alifia Faizatul. "TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 (Studi Di CV Baruna Putra Pandaya)." *Etheses Uin Malang*. UIN Maulana Malik Ibrahim, 2024. http://etheses.uin-malang.ac.id/59315/1/200202110066.pdf.

Abdurrahman, Prof. Dr. Muslan. *Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum*. Edited by AH. Riyantono. 1st ed. Malang: UMM Press, 2009.

Admin. "Belum Kantongi Izin Operasi, Pemkab Tutup Operasional Perusahaan." Pemerintah Kabupaten Probolinggo, 2022. https://probolinggokab.go.id/belum-kantongi-izin-operasi-pemkab-tutup-operasional-perusahaan/.

"KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR)." Siimtaru PadangPanjang, 2022. https://simtaru.padangpanjang.go.id/beranda/detail_info_tataruang/kesesuaian-kegiatan-pemanfaatan-ruang-kkpr#:~:text=Pendaftaran dilakukan oleh pelaku usaha melalui Aplikasi,milik sendiri) * Informasi jenis Usaha (KBLI).

"Tak Berizin, 95 Cabang Koperasi Simpan Pinjam KOMIDA Ditutup KemenKopUKM." Smesta KemenkopUKM, 2022. https://smesta.kemenkopukm.go.id/news/tak-berizin-95-cabang-koperasi-simpan-pinjam-komida-ditutup-kemenkopukm.

"UMKM DI KABUPATEN TRENGGALEK UMKM DI KABUPATEN TRENGGALEK 'DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN.'" Sistem Informasi Satu Data Statistik Sektoral Pemerintah Kabupaten Trenggalek, 2024. https://satudata.trenggalekkab.go.id/dataset/722/2024/umkm-se-kabupaten-trenggalek.

annonim. "Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam." *Al-Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2014, 1–18. http://jurnal.sties-baktiya.ac.id/index.php/alhisab/article/view/63.

Arini, Hesty Rinda. "EFEKTIVITAS PENDAFTARAN IZIN USAHA UMKM MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM DAN MASLAHAH MURSALAH." *Etheses Uin Malang*. UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023. http://etheses.uin-malang.ac.id/59315/1/200202110066.pdf.

Bimaresmana, Muhammad, Opan Satria Mandala, Nakzim Khalid Siddiq, and Maulana Syekh Yusuf. "Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Berbasis Risiko (Studi Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Mataram) Implementation of Risk-Based Business Permits (Study of Micro , Small and Medium Enterprises in Mataram City) Universitas Bumigora , Indonesia Perizina." *Jurnal Findametal Justice* 4, no. 2 (2023).

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H. *Buku Ajar Hukum Perizinan Online Single Submission (OSS)*. 1st ed. Bantul: CV. MFA, 2020.

Dwiputra, Nugraha dkk. *OSS RBA; Cara Baru Menurus Perizinan Berusaha Apa Dan Bagaimana OSS RBA Diterapkan Oleh Pelaku Usaha*. Edited by Nurul Adhha. 1st ed. Jogjakarta: Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia, 2023.

Ena, Zet, and Sirda H Djami. "Peranan Motivasi Intrinsik Dan Motivasi Ekstrinsik Terhadap Minat Personel Bhabinkamtibmas Polres Kupang Kota." *Among Makarti* 13, no. 2 (2021): 68–77. https://doi.org/10.52353/ama.v13i2.198.

Farida, Ida, and Muhammad Luthfi Radian. "Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku UMKM Di Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi." *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024).

Fuadah, Dr.Nadia Nurotul. "Amankah Menggoreng Kerupuk Dengan Pasir?" Alodokter, 22AD. https://www.alodokter.com/komunitas/topic/amankah-menggoreng-kerupuk-dengan-pasir-.

Hasibuan, Zulkarnain. "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini." *Publik* 2, no. 2 (2014): 78–92. http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/40.

Herbert C. Kelman. "Compliance_identification_and_internalization: Three of Process Attitude Change." *Journal of Conflict Resolution* 2, no. 1 (1959): 51–60. https://scholar.harvard.edu/hckelman/files/Compliance_identification_and_internalization.pdf.

Indonesia, Admin Kadin. "UMKM Indonesia." Kadin Indonesia, 2023. https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/.

Mathar, Ahmad. "Sanksi Dalam Peraturan Perundang Undangan." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 45–60. https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/602/482.

Naimatus, Sholikah. "Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima Di Ngunut Terhadap Peraturan Daerah No 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum"." *Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung*, 2019, 8–46.

Peraturan Pemerintah RI. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Peraturan Pemerintah 390 (2021).

Prasiwi, Safira Diah, Lailul Mursyidah, and Slamet Hari Sutanto. "Implementasi Kebijakan Perizinan Usaha Mikro Dan Kecil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 (Studi Usaha Mikro Dan Kecil Topi Di Desa Punggul, Kabupaten Sidoarjo)." *Cakrawala* 18, no. 1 (2024): 59–73. https://doi.org/10.32781/cakrawala.v18i1.629.

Rahmadani, setya risky. "Metode Penelitian." *Metode Penelitian*, 2018. http://repository.stei.ac.id/8152/4/BAB 3.pdf.

Rahmadania, Anisyah, and Hery Noer Aly. "Implementasi Teori Hirarchy Of Needs Maslow Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Di Yayasan Cahaya Generasi Islam Kota Bengkulu." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 4 (2023): 261–72. https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i4.17456.

Redi, Ahmad, Luthfi Marfungah, Rayhan Fiqi Fansuri, Michelle Prawira, and

Agatha Lafentia. “Perizinan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm): Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum Dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan.” *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 6, no. 1 (2022): 282. https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v6i1.13553.2022.

Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.” *Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia*, no. 176733 (2023): 1–1127.

Siregar, Lis Yulianti Syafrida. “Motivasi Sebagai Pengubahan Perilaku.” *Forum Paedagogik* 11, no. 2 (2020): 81–97. https://doi.org/10.24952/paedagogik.v12i2.3156.

Syamsarina, Syamsarina, M. Ibrahim Aziz, Arzam Arzam, Defril Hidayat, and Ari Bakti Windi Aji. “Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat.” *Jurnal Selat* 10, no. 1 (2022): 81–90. https://doi.org/10.31629/selat.v10i1.5216.

Syarifuddin, Prof. Dr. H. Amir. *Ushul Fiqh 2*. 7th ed. Jakarta: Kencana Prenadamediagroup, 2014.

Skripsi

A’la, Alifia Faizatul. “TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 (Studi Di CV Baruna Putra Pandaya).” *Etheses Uin Malang*. UIN Maulana Malik Ibrahim, 2024. http://etheses.uin-malang.ac.id/59315/1/200202110066.pdf.Naimatus, Sholikah. “Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima Di Ngunut Terhadap Peraturan Daerah No 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum”.” *Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung*, 2019, 8–46.

Arini, Hesty Rinda. “EFEKTIVITAS PENDAFTARAN IZIN USAHA UMKM MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM DAN MASLAHAH MURSALAH.” *Etheses Uin Malang*. UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023. http://etheses.uin-malang.ac.id/59315/1/200202110066.pdf.

Rahmadani, setya risky. “Metode Penelitian.” *Metode Penelitian*, 2018. http://repository.stei.ac.id/8152/4/BAB 3.pdf.

Rivana, A R I Raviano. “Implementasi Kebijakan Penyelengaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riiau, 2023. https://repository.uin-suska.ac.id/71573/2/TANPA BAB IV.pdf.

Rahmadani, setya risky. “Metode Penelitian.” *Metode Penelitian*, 2018. http://repository.stei.ac.id/8152/4/BAB 3.pdf.

Website

Admin. “Belum Kantongi Izin Operasi, Pemkab Tutup Operasional Perusahaan.”

Pemerintah Kabupaten Probolinggo, 2022. https://probolinggokab.go.id/belum-kantongi-izin-operasi-pemkab-tutup-operasional-perusahaan/.

"KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR)." Siimtaru PadangPanjang, 2022. https://simtaru.padangpanjang.go.id/beranda/detail_info_tataruang/kesesuaian-kegiatan-pemanfaatan-ruang-kkpr#:~:text=Pendaftaran dilakukan oleh pelaku usaha melalui Aplikasi,milik sendiri) * Informasi jenis Usaha (KBLI).

"Tak Berizin, 95 Cabang Koperasi Simpan Pinjam KOMIDA Ditutup KemenKopUKM." Smesta KemenkopUKM, 2022. https://smesta.kemenkopukm.go.id/news/tak-berizin-95-cabang-koperasi-simpan-pinjam-komida-ditutup-kemenkopukm.

"UMKM DI KABUPATEN TRENGGALEK UMKM DI KABUPATEN TRENGGALEK 'DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN.'" Sistem Informasi Satu Data Statistik Sektoral Pemerintah Kabupaten Trenggalek, 2024. https://satudata.trenggalekkab.go.id/dataset/722/2024/umkm-se-kabupaten-trenggalek.

Fatimah, Siti. "UMKM Terancam Denda Rp 4 M Jual Makanan Tanpa Izin BPOM." detikFinance, 2021. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5768640/viral-umkm-terancam-denda-rp-4-m-jual-makanan-tanpa-izin-bpom.

Indonesia, Admin Kadin. "UMKM Indonesia." Kadin Indonesia, 2023. https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/.

Makanan, Pusat Data dan Informasi Obat dan. "PENJELASAN BADAN POM RI TENTANG PERAN AKTIF MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN." pom.go.id, 2018. https://www.pom.go.id/penjelasan-publik/penjelasan-badan-pom-ri-tentang-peran-aktif-masyarakat-dalam-pengawasan-obat-dan-makanan#:~:text=Badan POM RI berwenang melakukan,%2C penindakan%2C dan pemberdayaan masyarakat.

Buku

Abdurrahman, Prof. Dr. Muslan. *Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum*. Edited by AH. Riyantono. 1st ed. Malang: UMM Press, 2009.

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H. *Buku Ajar Hukum Perizinan Online Single Submission (OSS)*. 1st ed. Bantul: CV. MFA, 2020.

Dwiputra, Nugraha dkk. *OSS RBA; Cara Baru Menurus Perizinan Berusaha Apa Dan Bagaimana OSS RBA Diterapkan Oleh Pelaku Usaha*. Edited by Nurul Adhha. 1st ed. Jogjakarta: Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia, 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah RI. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pra Research



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Hal : Pra-Penelitian

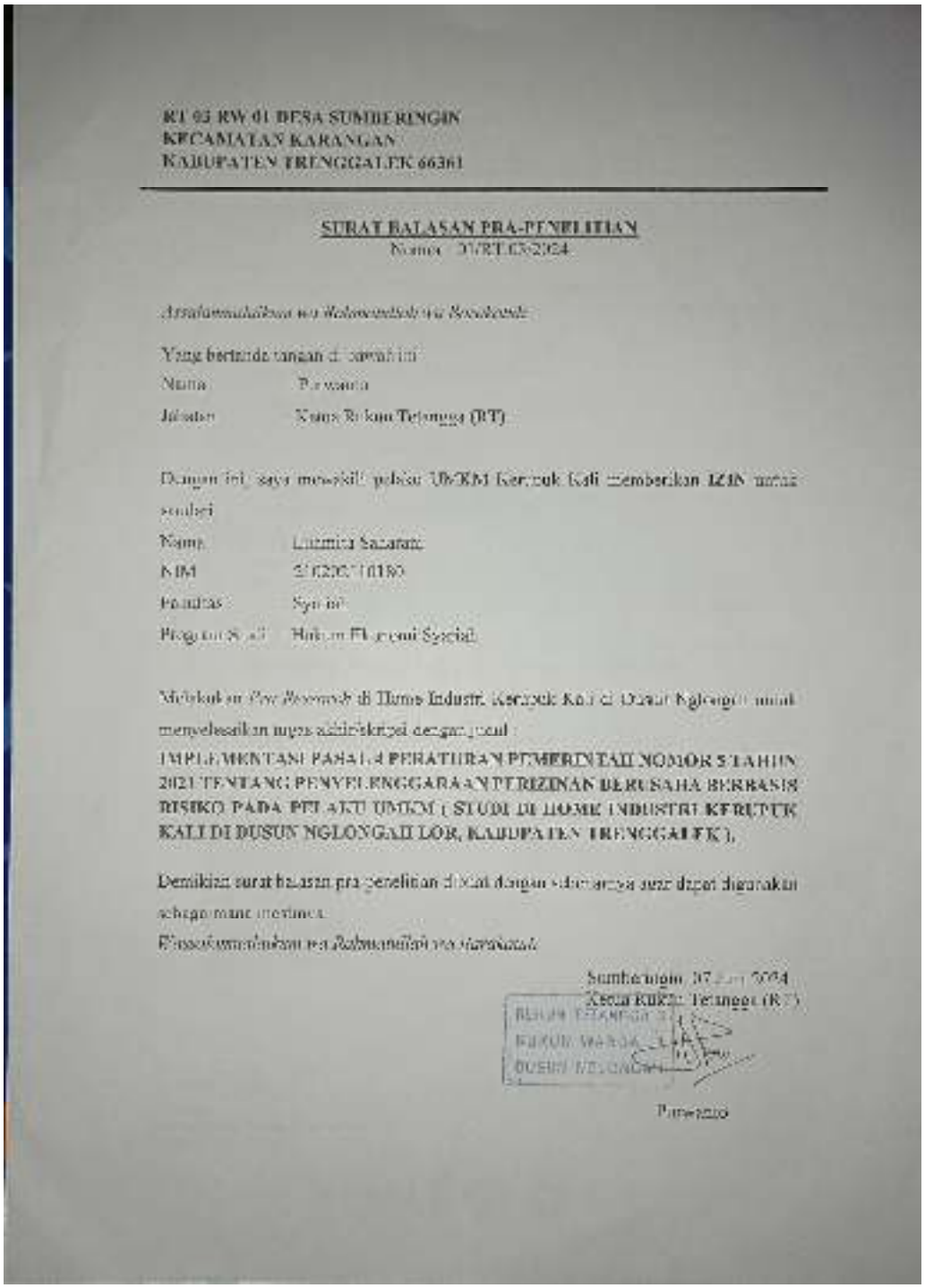
Kepada Yth
Pemerintah Desa Sukorejo Kecamatan Kaliwungu Kab
RT. 05 RW 01 Desa Nglongah Kec. Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah

Nama
NIK
Fakultas
Program Studi

DIPLEMENTASI PASAL 4 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO PADA PELAKU UMKM
(STUDI HOME INDUSTRI KERUPUK KALI DI DESUN NGLONGAH, KABUPATEN TEMANGGALEK)

Tembusan :
1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha

Lampiran 2 Surat Balasan Pra Reseaach



RT 03 RW 01 DESA SUMBERINGIN
KECAMATAN KARANGAN
KABUPATEN TRENGGALEK 66361

SURAT BALASAN PRA-PENELITIAN
Nomor : 37/RT.03/2024

Assalamualaikum wa Wahmatullahi wa Barakatuh

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Purwanto

Jabatan : Ketua Rukun Tetangga (RT)

Dengan ini saya memberikan pelaku UMKM kerupuk kali memberikan IZIN untuk meneliti

Nama : Luzmira Sazarani

NIM : 210203110180

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Melakukan *Pra Research* di Home Industri Kerupuk Kali di Dusun Nglongah untuk menyelesaikan tugas akhir/skripsi dengan judul :

IMPLEMENTASI PASAL 3 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO PADA PELAKU UMKM (STUDI DI HOME INDUSTRI KERUPUK KALI DI DUSUN NGLONGAH LOR, KABUPATEN TRENGGALEK),

Demikian surat balasan pra penelitian ini kami dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

Sumberingin, 07 Juni 2024
Ketua Rukun Tetangga (RT)

Purwanto

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

No	Fokus Wawancara	Pertanyaan Wawancara
1.	Identitas Pelaku Usaha dan Latar Belakang Pendirian Usaha	1. Siapa nama Ibu/Bapak? 2. Mengenai pendidikan, apa pendidikan terakhir yang ditempuh Ibu/Bapak? - SMA/SLTA/sederajat 3. Bagaimana awal mula industri ini berdiri dan dimulai sejak tahun berapa? 4. Berapa modal awal pendirian usaha ini? 5. Apakah Ibu / Bapak memiliki karyawan dalam mengelola industri ini? 6. Berapa banyak hasil produksi kerupuk kali yang dihasilan dalam per hari? 7. Berapa jumlah kerupuk kali yang disetorkan/dikirim kepada supllier? 8. Berapa jumlah gaji yang diterima oleh karyawan? Apakah ada benefit lain yang diberikan oleh pemilik usaha kepada karyawan? 9. Berapa jumlah supllier Ibu/Bapak selama menjalankan usaha ini? 10. Untuk pembeli ecer, apakah harga perkilo sama dengan harga supllier?
2.	Pengetahuan hukum tentang perizinan usaha	1. Apakah Ibu / Bapak mengetahui mengenai perizinan usaha? - Hanya sekedar tahu. 2. Apakah Ibu /Bapak mengetahui mengenai perizinan berusaha berbasis risiko? - Tidak mengetahui perizinan berusaha berbasis risiko 3. Apakah Ibu /Bapak mengetahui bahwa perizinan usaha merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap pelaku usaha atau UMKM? - tidak 4. Apa alasan Ibu/Bapak tidak mendaftarkan izin usahanya? - Karena tidak tau informasinya

3.	Pengetahuan tentang lembaga	1. Apakah Ibu / Bapak mengetahui siapa yang bertanggung jawab atau yang berwenang dalam menerbitkan izin usaha? - Tidak **2.** Apakah tidak ada sosialisasi atau hal lain yang dilakukan oleh pemerintah? - Pelaku usaha 1 : Tidak ada, tapi pernah ada yang datang menawarkan bantuan untuk mendaftarkan sertifikat halal. Akan tetapi sampai saat ini tidak ada kejelasan dengan sertifikat halal tersebut. - Pelaku usaha 2-6 : menyatakan tidak ada sosialisasi terkait penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
4.	Pengetahuan tentang peraturan perizinan berusaha berbasis risiko dan pelaksanaannya	1. Apakah Ibu/Bapak mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perizinan usaha bagi pelaku usaha atau UMKM? - Ke enam pelaku usaha menyatakan ketidaktahuan terhadap penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 2. Apakah Ibu / Bapak mengetahui tentang sistem OSS (Online Single Submission)? - tidak 3. Apakah Ibu/Bapak mengetahui bagaimana cara pendaftaran izin usaha? - Ke enam pelaku usaha menyatakan tidak mengetahui cara daftarnya.
5.	Sanksi	1. Apakah Ibu/Bapak mengetahui bahwa jika pelaku usaha atau UMKM atau suatu kegiatan usaha yang tidak mendaftarkan izin usahanya akan dikenai sanksi? - Tidak
6.	Pertanyaan tambahan	1. Apakah di Dusun Nglongah Lor tidak ada paguyupan atau perkumpulan UMKM? - Tidak ada 2. Setelah mengetahui bahwa izin usaha menjadi kewajiban pelaku usaha, maka apakah Ibu/Bapak bersedia untuk mendaftarkan usahanya?

- mengatakan tidak perlu karena kegiatan usaha ini masih kecil.
- Jika yang lain mendaftarakan, maka juga ikut mendaftar

3. Apa alasan ketidakinginan pelaku usaha mendaftarkan izin usahanya?

- Menghindari pajak
- Tidak ada penerus
- Prosesnya yang sulit
- Hanya tergolong usaha kecil-kecilan

Pedoman wawancara konsumen Kerupuk Kali

1. Apakah anda mengetahui produk kerupuk yang digoreng dengan pasir?
2. Bagaimana menurut anda penggorengan kerupuk dengan pasir?

- Aman saja selama tidak ada pasir yang menempel

3. Apakah anda pernah mengkonsumsi kerupuk kali?

- pernah

4. Apakah anda pernah menemukan kualitas produk yang rendah?

- Pernah memakan pasir yang menempel di kerupuk.

Lampiran 4 Foto Produksi, Pengolahan, dan wawancara



(Proses pengolahan kerupuk dengan alat yang masih tradisional)



(Foto Produk Kerupuk Kali dalam keadaan setengah matang)





(proses pengukusan kerupuk)







DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama	Luhmita Saharani
Jenis Kelamin	Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir	Trenggalek, 23 Maret 2003
Agama	Islam
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat di Malang	Jalan Sunan Kalijaga Dalam Nomor 5B, Dinoyo, Lowokwaru, Malang

Alamat Rumah	RT 15 RW 03 Dusun Jeruk, Desa Kedungsigit, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek, 66361, Jawa Timur
Nomor Telepon	087750704652
Email	luhmitasaharani49@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

TK Dharma Wanita 2 Kedungsigit	Tahun 2006 - 2007
SD Negeri 2 Kedungsigit	Tahun 2007 - 2013
SMP Negeri 1 Karangan	Tahun 2013 - 2018
SMA Negeri 1 Karangan	Tahun tahun 2018 - 2021
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Tahun 2021 - 2024